Winarno
Mike Kusumawati

SD & MI

6

Pendidikan Kewarganegaraan

Untuk Sekolah Dasar & Madrasah Ibtidaiyah Kelas VI

Winarno
Mike Kusumawati

Pendidikan Kewarganegaraan 6

Untuk SD dan MI Kelas VI

PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

Pendidikan Kewarganegaraan 6

Penyusun:
Winarno
Mike Kusumawati

Editor:
Wahyuningrum Widayati

Penata Letak Isi:
Sri Rahayu

Desainer Sampul:
Wahyudin M. Anwar

Ilustrator:
Ady Wahyono

Sumber Ilustrasi Cover: http://anakindonesiamembangun.org

372.8
WIN
p

WINARNO
Pendidikan Kewarganegaraan 6 : Untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Kelas VI / Penyusun Winarno, Mike Kusumawati ; Editor Wahyuningrum Widayati Ilustrator Ady Wahyono. — Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2009.

vi, 82 hlm. : ilus. ; 25 cm.
Bibliografi : hlm. 80

ISBN 978-979-068-082-1 (no.jil.lengkap)
ISBN 978-979-068-096-8

1. Pendidikan Moral Pancasila-Studi dan Pengajaran
2. Pendidikan Moral Pancasila-Pendidikan Dasar
I. Judul II. Mike Kusumawati III. Wahyuningrum Widayati IV. Ady Wahyono

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional
Tahun 2009
Diperbanyak oleh ...

Kata Sambutan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2008, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (*website*) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2008 tanggal 7 NOvember 2008.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (*down load*), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Februari 2009

Kepala Pusat Perbukuan

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa, karena atas berkat dan rahmat serta hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan untuk tingkat Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Kelas VI.

Para siswa sekalian, penulis mengucapkan selamat kepada para siswa karena telah berhasil masuk di kelas VI. Buku Pendidikan Kewarganegaraan yang ada di hadapan para siswa ini disusun dengan maksud membantu para siswa agar dapat belajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan baik dan menyenangkan.

Untuk lebih memperdalam kemampuan siswa dalam mempelajari buku ini, penulis memberikan berbagai kegiatan belajar dalam berbagai bentuk soal. Di antaranya, beberapa tugas yang menuntut siswa untuk aktif dalam pembelajaran ini. Dengan demikian belajar Pendidikan Kewarganegaraan akan semakin bermanfaat, bermakna, dan menyenangkan para siswa.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis juga mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas buku Pendidikan Kewarganegaraan ini.

Sekian, dan selamat belajar!

Surakarta, Maret 2008

Penulis

Daftar Isi

Bab 1 Nilai Juang dalam Proses Perumusan Pancasila

Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*

Apakah Pancasila itu? Kapan Pancasila dirumuskan? Menurut sejarahnya, Pancasila dirumuskan dan ditetapkan oleh para pendiri negara untuk dijadikan dasar negara bagi Indonesia merdeka. Bagaimana proses perumusan Pancasila dan nilai-nilai juang apa saja yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari?

Pada bab I di kelas VI ini, kalian akan belajar tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan belajar ini kalian diharapkan dapat menjelaskan nilai-nilai juang apa saja yang ditampilkan oleh tokoh-tokoh bangsa dalam proses merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, kalian juga dapat menceritakan kembali secara singkat tentang nilai-nilai perjuangan bangsa. Harapannya sebagai generasi penerus kalian dapat mewarisi, meneladani dan melanjutkan nilai-nilai juang tersebut untuk membangun Indonesia di masa depan.

Peta Konsep
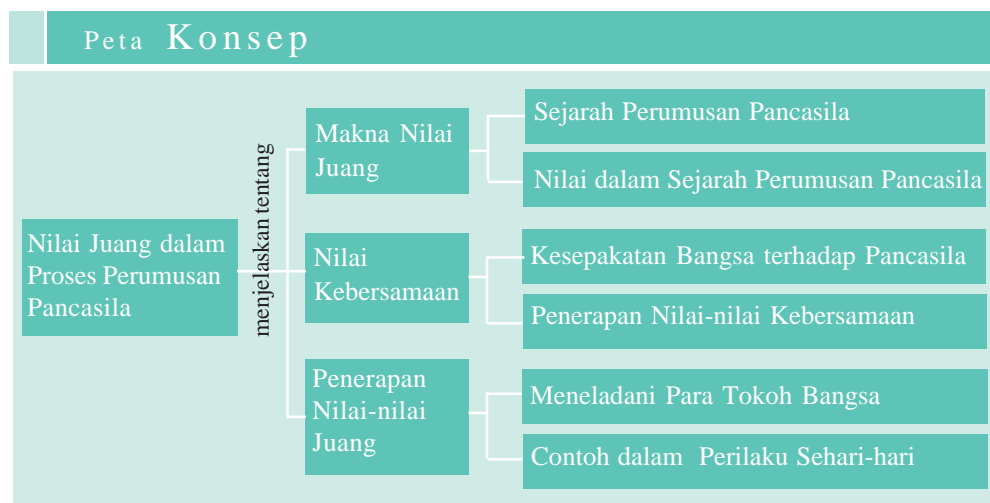
Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan dasar negara dan ideologi negara. Menurut sejarahnya, Pancasila dirumuskan dan ditetapkan oleh para pendiri negara untuk dijadikan dasar negara bagi Indonesia merdeka. Dalam proses perumusan Pancasila tersebut terdapat nilai-nilai juang yang dilakukan para tokoh bangsa pada masa lalu.

A. Makna Nilai Juang dalam Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Proses perumusan Pancasila tidak lepas dari perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka dan lepas dari penjajahan. Pada waktu itu Pancasila dimaksudkan untuk menjadi dasar negara Indonesia merdeka di kelak kemudian hari.

Dari sejarah perumusan Pancasila, banyak sekali nilai-nilai juang yang dapat dijadikan teladan atau contoh bagi generasi muda Indonesia. Nilai-nilai tersebut terutama nilai-nilai perjuangan. Hal ini karena Pancasila dirumuskan pada masa perjuangan.

Untuk itu, agar kalian mengetahui nilai-nilai juang apa saja yang dapat digali dari sejarah perumusan Pancasila, maka perlu kalian ketahui terlebih dahulu sejarah perumusan Pancasila.

1. Proses Sejarah Perumusan Pancasila

a. Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)

Pada akhir tahun 1944, Jepang banyak mengalami kekalahan melawan Sekutu. Agar mendapat dukungan dari negara-negara jajahannya Jepang menjanjikan akan memberi kemerdekaan kepada bangsa-bangsa tersebut. Indonesia

Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*

Gambar 1.1 *Sidang BPUPKI*

sebagai negara jajahan Jepang juga dijanjikan akan mendapatkan kemerdekaan. Janji kemerdekaan untuk bangsa Indonesia diucapkan oleh Perdana Menteri Jepang Koiso pada bulan September 1944.

Dalam usaha mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan akan membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (*Dokuritsu Junbi Chosakai*) disingkat BPUPKI.

BPUPKI memiliki arti penting bagi Indonesia karena badan inilah yang menghasilkan rancangan Pembukaan UUD yang di dalamnya ada Pancasila dan Batang Tubuh UUD. Badan ini terbentuk pada tanggal 29 April 1945, tetapi baru diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945. BPUPKI diketuai oleh dr. Radjiman Widyodiningrat dengan dua orang wakil ketua masing-masing Icebangase (orang Jepang) dan Raden Panji Soeroso. Sedangkan BPUPKI untuk Pulau Sumatra baru dibentuk tanggal 25 Juli 1945 dan hanya mampu menyusun program-program jangka pendek.

1) *Sidang BPUPKI I tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945*

Siapakah yang membentuk BPUPKI?

Sidang pertama BPUPKI membahas tentang rancangan dasar negara. Hal ini sesuai dengan permintaan ketua BPUPKI dr. Radjiman Widyodiningrat yang menanyakan apa dasar bagi negara yang akan kita bentuk.

Banyak anggota yang berpidato dan berusaha menjawab permintaan ketua sidang tersebut. Di antara para anggota tersebut adalah Moh. Hatta, Haji Agus Salim, Samsoedin, Wongsonegoro, Ki Bagus Hadikusumo, Muh. Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno.

a) Muhammad Yamin (29 Mei 1945)

Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*

Gambar 1.2 *Muhammad Yamin*

Dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan pidatonya di hadapan sidang lengkap BPUPKI. Dalam pidato itu beliau mengusulkan dasar negara bagi negara Indonesia merdeka yang akan dibentuk. Adapun pidatonya mengenai asas dan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia, yang isinya sebagai berikut.

(1) Perikebangsaan
(2) Perikemanusiaan
(3) Periketuhanan
(4) Perikerakyatan
(5) Kesejahteraan rakyat

b) Mr. Soepomo (31 Mei 1945)

Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*

Gambar 1.3 *Mr. Soepomo*

Mr. Soepomo mendapat giliran berpidato tanggal 31 Mei 1945. Pidatonya mengungkapkan masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara. Masalah-masalah tersebut adalah sebagai berikut.

(1) Paham negara persatuan
(2) Hubungan antara agama dengan negara
(3) Sistem badan permusyawaratan
(4) Sosialisme negara
(5) Hubungan antarbangsa

Pidato Mr. Soepomo tersebut kemudian dikenal dengan pidato mengenai paham negara integralistik.

c) Ir. Soekarno (1 Juni 1945)

Sumber:*wikimedia.org/wikipedia//*

Gambar 1.4 *Ir. Soekarno*

Dalam sidang BPUPKI hari selanjutnya, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno mengajukan usul lima dasar atau prinsip bagi negara Indonesia merdeka. Dalam pidatonya mengenai dasar negara, Ir. Soekarno mengajukan lima dasar negara, yaitu sebagai berikut.

(1) Kebangsaan Indonesia
(2) Internasionalisme atau perikemanusiaan

(3) Mufakat atau demokrasi
(4) Kesejahteraan sosial
(5) Ketuhanan yang berkebudayaan

Lima dasar atau prinsip di atas beliau namakan Pancasila. *Panca* berarti lima, *sila* berarti dasar. Di atas lima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia merdeka. Pidato Ir. Soekarno ini kemudian dikenal dalam sejarah sebagai pidato lahirnya Pancasila. Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila.

Setelah itu, BPUPKI mengalami reses (masa istirahat). Di sela-sela masa itu sebagian anggota BPUPKI berkumpul di Jakarta untuk mencari kesepakatan atas hasil sidang BPUPKI I. Ada sembilan orang anggota BPUPKI yang berupaya keras merumuskan rancangan pembukaan hukum dasar negara yang di dalamnya ada asas atau dasar negara. Panitia ini selanjutnya dikenal dengan nama panitia sembilan. Anggota panitia sembilan terdiri atas:

Uji Diri

Siapakah yang menjadi ketua panitia sembilan?

(1) Ir. Soekarno
(2) Drs. Mohammad Hatta
(3) Mr. A.A. Maramis
(4) KH. Wachid Hasyim
(5) Abdul Kahar Muzakir
(6) Abikusno Tjokrosuyoso
(7) H. Agus Salim
(8) Mr. Ahmad Subardjo
(9) Muhammad Yamin

Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia sembilan berhasil merumuskan rancangan mukadimah (pembukaan) hukum dasar, yang kemudian dinamakan Piagam Jakarta.

Di dalam rancangan mukadimah hukum dasar negara itu termuat pula rumusan lima prinsip dasar negara, yaitu:

(1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
(2) Kemanusiaan yang adil dan beradab.
(3) Persatuan Indonesia.
(4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
(5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hasil rumusan itu selanjutnya dibawa ke sidang BPUPKI II untuk mendapatkan keputusan bersama.

2) Sidang BPUPKI II tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945

Tahukah Kamu?

Dalam sidang BPUPKI II disetujui pembentukan panitia perancang Undang-Undang Dasar (UUD) yang diketuai Soekarno. Panitia ini kemudian menyetujui Piagam Jakarta sebagai pembukaan UUD sekaligus membentuk panitia kecil perancang UUD 1945 yang diketuai Soepomo.

Dalam sidang ini BPUPKI menerima hasil kerja panitia sembilan yang berupa rancangan pembukaan hukum dasar negara. Selain itu BPUPKI bersidang untuk merumuskan hal-hal lain yang berkenaan dengan pembentukan negara. Hal-hal tersebut antara lain:

a) Mengenai wilayah negara.
b) Perihal bentuk negara, republik atau kerajaan.
c) Lembaga-lembaga negara, dan lain-lain.

Setelah dibicarakan bersama, maka rumusan ini disepakati oleh para anggota BPUPKI untuk dijadikan rancangan hukum dasar negara. Dengan demikian, sampai berakhirnya sidang, BPUPKI menghasilkan 3 putusan penting, yaitu:

a) Rancangan pembukaan atau mukadimah hukum dasar negara.
b) Rancangan hukum dasar negara.
c) Pernyataan kemerdekaan Indonesia.

Di dalam rancangan pembukaan hukum dasar negara, terdapat lima prinsip atau dasar yang ditetapkan sebagai dasar negara. Lima prinsip dasar negara ini tertuang dalam alinea IV rancangan pembukaan hukum dasar negara.

b. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

Dengan berakhirnya sidang BPUPKI maka tugasnya dianggap selesai. Sebagai kelanjutannya maka pada tanggal 9 Agustus 1945 Jepang membentuk panitia persiapan kemerdekaan (*dokuritsu junbi inkai*) yang juga sering disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ir. Soekarno diangkat sebagai ketua dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil ketuanya.

Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*

Gambar 1.5 *Proklamasi 17 Agustus 1945*

PPKI merupakan badan bentukan Jepang yang semula bertugas mempersiapkan kemerdekaan

Indonesia. Namun, pada akhirnya mempunyai kedudukan yang sangat penting, yaitu:

1) Mewakili seluruh bangsa Indonesia.
2) Sebagai pembentuk negara.
3) Mempunyai wewenang meletakkan dasar negara.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang. Hasil sidang tersebut adalah

a. Menetapkan undang-undang dasar negara Indonesia yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Undang-undang dasar negara Indonesia yang ditetapkan PPKI ini terkenal dengan nama UUD 1945.
b. Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden Republik Indonesia dan Moh. Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia.
c. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Uji Diri

Apa yang dimaksud Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)?

Rumusan pancasila terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV. Pancasila dimaksudkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dengan ditetapkan UUD 1945 tersebut maka berarti ditetapkan pula pancasila sebagai dasar negara.

Pancasila sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945, berisi lima prinsip dasar sebagai berikut.

1) Ketuhanan Yang Maha Esa
2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
3) Persatuan Indonesia
4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 ini merupakan hasil yang sah dan diterima oleh bangsa Indonesia.

Meskipun kata Pancasila sendiri tidak termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, tetapi secara umum sudah dikenal luas bahwa lima sila atau nilai dasar tersebut adalah Pancasila. Pancasila adalah nama dari dasar negara sebagaimana pernah dinyatakan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945.

2. Nilai-nilai Juang dalam Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Berdasar pada uraian sejarah di atas, kalian mengetahui bagaimana proses dirumuskan dan disepakatinya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan hasil perumusan dan kesepakatan para tokoh perjuangan dan para pendiri negara. Mereka telah bekerja keras mencari dan merumuskan dasar-dasar negara untuk Indonesia yang merdeka.

Dalam proses perumusan Pancasila, terdapat beberapa nilai juang yang ditampilkan para tokoh bangsa tersebut. Nilai-nilai ini dinamakan nilai juang sebab terjadi pada masa perjuangan bangsa.

Nilai-nilai juang tersebut, antara lain:

Pernahkah kalian ber-musyawarah? Dalam hal apa?

a. Musyawarah

Para pendahulu negara kita telah memberi contoh bahwa dalam menyelesaikan masalah dilakukan dengan cara musyawarah. Misalnya dengan mengadakan rapat atau sidang. Untuk menyelesaikan masalah negara para tokoh menyelenggarakan sidang BPUPKI, PPKI, dan rapat-rapat lainnya.

b. Menghargai Pendapat

Dalam sidang-sidang BPUPKI, PPKI, dan sidang lainnya, para anggota telah menunjukkan contoh saling menghargai pendapat. Mereka saling memberi, menerima, dan membuat kesepakatan-kesepakatan bersama.

c. Tanpa Pamrih

Para tokoh bangsa berjuang tanpa pamrih. Mereka bersidang dengan semangat hanya untuk menghasilkan yang terbaik bagi bangsanya. Mereka tidak banyak berharap mendapatkan keuntungan diri sendiri.

d. Kerja Keras

Para tokoh bangsa bekerja keras untuk menghasilkan karya terbaik bagi bangsa. Contohnya, panitia sembilan bekerja keras untuk menyepakati rancangan pembukaan hukum dasar negara meskipun BPUPKI sedang masa reses.

e. Rela Berkorban

Para tokoh bangsa rela berkorban. Mereka rela meninggalkan keluarga dan tempat tinggal. Demikian pula rela mengorbankan waktu, tenaga bahkan jiwa dalam rangka memerdekakan Indonesia.

f. Keberanian

Para anggota BPUPKI mengadakan sidang di tengah ancaman penjajahan Jepang. Meskipun demikian mereka tetap berani menyuarakan keinginan untuk merdeka.

Uji Diri

Berilah contoh sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan!

g. Mengutamakan Persatuan dan Kesatuan

Para anggota BPUPKI dan PPKI meskipun dari berbagai daerah di Indonesia tetapi tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa daripada kepentingan golongan. Demi persatuan dan keutuhan bangsa, mereka bersedia dan rela untuk tidak memaksakan kehendaknya.

Contohnya, golongan Islam rela dengan perubahan sila I Piagam Jakarta yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini demi untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ini merupakan wujud pengorbanan dan semangat persatuan dari umat Islam.

h. Mencari Kesepakatan/Mufakat

Dalam mendapatkan putusan, para anggota sidang berusaha mencari kesepakatan atau kata mufakat. Contohnya adalah menyepakati Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila bukan hasil paksaan tetapi kesepakatan bangsa Indonesia.

i. Menghindari Kekerasan

Sumber: *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar 5*

Gambar 1.6 *Pembentukan KNIP merupakan hasil keputusan rapat PPKI*

Bila ada perbedaan pendapat, maka tetap ditempuh cara damai bukan dengan kekerasan dan paksaan. Para anggota PPKI tidak saling menekan dan memaksa. Contohnya, pada saat pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat pada tanggal 18 Agustus 1945 di Jakarta.

Tugas 1.1

Tuliskan dan urutkan berdasar pendapat kalian masing-masing tentang nilai-nilai juang para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara!

Buatlah pada sebuah kertas karton! Tugas dikerjakan secara kelompok! Hasil tiap kelompok dibacakan di muka kelas selanjutnya dijadikan majalah dinding kelas!

B. Nilai Kebersamaan dalam Proses Perumusan Pancasila

Pancasila merupakan hasil keputusan bersama. Usulan-usulan mengenai dasar negara dikemukakan oleh para tokoh pergerakan bangsa Indonesia dalam sidang I BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Para tokoh bangsa itu antara lain Muh. Yamin, Ir. Soekarno, Bagus Hadikusumo, Muh. Hatta, dan Mr. Soepomo. Selanjutnya usulan-usulan itu diolah dan disepakati dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 sebagai rancangan pembukaan hukum dasar negara.

Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 disepakati rancangan pembukaan hukum dasar negara dan rancangan hukum dasar negara sebagai Undang-Undang Dasar negara Indonesia tahun 1945. Di dalam bagian Pembukaan UUD 1945 alinea IV terdapat Pancasila sebagai dasar negara.

1. Kesepakatan Bangsa terhadap Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai kesepakatan bangsa, sebab merupakan hasil keputusan bersama para pendiri negara baik melalui rangkaian sidang-sidang BPUPKI maupun PPKI.

Rumusan Pancasila sebagaimana dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dianggap sebagai *gentlement agreement* atau perjanjian luhur pertama bangsa Indonesia. Hal ini karena rumusan dalam Piagam Jakarta itulah yang disepakati dari hasil sidang BPUPKI I dan dijadikan putusan bersama dalam sidang BPUPKI II.

Rumusan Pancasila sebagaimana yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 merupakan *gentlement agreement* (kese-

pakatan luhur) kedua bangsa Indonesia. Hal ini karena Pancasila telah disepakati sebagai dasar negara oleh sidang PPKI yang merupakan badan pembentuk negara dan mewakili bangsa Indonesia.

Rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 inilah yang kita gunakan sampai sekarang. Hal ini karena kita menggunakan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar atau hukum dasar negara.

Pancasila sebagai dasar negara sekarang ini semakin disepakati dan ditegaskan kedudukannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Penerapan Nilai-nilai Kebersamaan dalam Kehidupan Sehari-hari

Para tokoh bangsa atau pendiri negara telah bekerja keras untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Mereka membicarakan secara bersama-sama mengenai dasar negara tersebut. Apa yang diputuskan adalah keputusan bersama pula.

Dalam kehidupan sehari-hari, hasil keputusan bersama ada pada lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di keluarga menyangkut tugas-tugas setiap anggota keluarga, di sekolah menyangkut peraturan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh semua warga sekolah, di masyarakat menyangkut peraturan yang mengikat seluruh warga masyarakat.

Sumber: *www.malangkab.go.id*

Gambar 1.7 *Mengamalkan nilai-nilai kebersamaan dengan kerja bakti*

Para anggota BPUPKI maupun PPKI berasal dari berbagai suku, agama, dan golongan yang ada di Indonesia. Ada yang berasal dari Jawa dan dari luar Jawa. Ada yang beragama Islam, Kristen, atau yang lain. Anggota BPUPKI ada pula yang keturunan Arab dan Tionghoa. Contohnya anggota BPUPKI Koen Hian Liem dan Tiang Tjoei Oey.

Namun, mereka tidak mempermasalahkan hal-hal tersebut. Mereka bersatu padu dan bersama-sama berupaya merumuskan dasar negara Indonesia merdeka di kelak kemudian hari.

Rasa persatuan dan kebersamaan inilah yang menentukan keberhasilannya menghasilkan sesuatu yang amat penting bagi bangsa dan negara. Pancasila sebagai dasar negara tidak akan dapat dihasilkan tanpa rasa kebersamaan dari para pendiri negara Indonesia.

Nilai kebersamaan inilah yang harus kalian teladani. Kalian sebagai generasi penerus sudah sewajarnya untuk mewarisi dan melanjutkan perjuangan para tokoh-tokoh bangsa kita. Mereka telah berjuang untuk menghasilkan Indonesia merdeka. Tugas kalian adalah melanjutkan perjuangan dengan cara mengisi kemerdekaan Indonesia. Salah satu syaratnya adalah kalian selalu memupuk rasa kebersamaan sebagai bangsa Indonesia.

Bagaimana contoh kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya adalah:

1. Belajar bersama.
2. Kerja kelompok.
3. Merasa sedih, berduka, dan mau membantu jika teman kita terkena musibah.
4. Jika ada kelebihan dibagi dengan teman-teman.
5. Membantu teman ataupun tetangga dengan ikhlas.

Tugas 1.2

Buatlah cerita singkat tentang pengalaman bersama kalian dalam membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Ingat! Tanpa kebersamaan kita tidak akan berhasil.
Tugas dibuat kelompok dan hasilnya dibacakan di muka kelas!

C. Penerapan Nilai-nilai Juang para Tokoh yang Berperan dalam Perumusan Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari

Berdasar uraian sebelumnya, kalian dapat mengetahui ada beberapa nilai-nilai juang yang dapat kalian petik dari sejarah perumusan Pancasila. Nilai-nilai juang tersebut antara lain, musyawarah, kerja keras, tanpa pamrih, menghargai pendapat, mufakat/sepakat, keberanian, rela berkorban, dan mengutamakan persatuan.

Nilai-nilai itu diterapkan oleh para tokoh bangsa atau pendiri negara kita. Hasilnya adalah mereka berhasil merumuskan sesuatu yang amat penting bagi negara Indonesia yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita meneladani para tokoh bangsa tersebut.

1. Meneladani para Tokoh Bangsa

Meneladani para tokoh bangsa berarti kalian berperilaku berdasarkan nilai-nilai yang pernah dilakukan oleh mereka di waktu dahulu. Meskipun mereka telah tiada namun nilai-nilai luhur yang pernah dilakukan tidak ikut hilang. Nilai-nilai itu tumbuh dalam perilaku bangsa Indonesia.

Nilai-nilai juang itu merupakan warisan dan harus kalian lanjutkan dengan cara meneladani perilaku para tokoh bangsa tersebut. Contohnya, nilai juang rela berkorban. Para pendiri negara kita telah memberikan contoh untuk rela berkorban demi tujuan Indonesia merdeka. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sangat dibutuhkan bagi kelangsungan bangsa Indonesia.

2. Contoh dalam Perilaku Sehari-hari

Kalian dapat berperilaku atas dasar nilai-nilai juang tersebut di masa kini. Contoh:

a. Nilai Musyawarah

1) Mengadakan rapat pemilihan ketua kelas.
2) Ikut rapat karang taruna.
3) Mengadakan musyawarah antarkelas.

b. Nilai Rela Berkorban

1) Membantu korban bencana alam.
2) Ikut menyumbang bila ada teman yang sakit.
3) Meminjamkan sesuatu pada yang membutuhkan.

c. Nilai Persatuan atau Kebersamaan

Sikap ini dimiliki oleh para tokoh pejuang kita pada saat merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dalam sidang BPUPKI para peserta sidang diberi kesempatan untuk menyampaikan pidatonya tentang

rumusan dasar negara, kemudian dibahas dan didiskusikan bersama untuk mendapatkan rumusan terbaik. Mereka tetap menggalang persatuan dan kesatuan meskipun berasal dari berbagai daerah dan mempunyai latar belakang yang berbeda. Nilai persatuan dan kebersamaan dapat diterapkan dengan cara:

1) Tidak suka kekerasan dan perkelahian.
2) Bersedia melerai perselisihan.
3) Mementingkan kepentingan bersama.

d. *Nilai Menghargai*

1) Menerima teman yang berbeda suku, golongan, atau agama.
2) Tidak memaksakan pendapat dalam suatu rapat.
3) Bersedia menerima pendapat teman.

Sumber: *Dokumen Penerbit*

Gambar 1.8 *Belajar giat*

e. *Nilai Tanpa Pamrih*

1) Ikhlas memberi sumbangan.
2) Membantu teman tanpa mengharap balasan.
3) Menolong dengan penuh rasa senang.

f. *Nilai Kerja Keras*

1) Berusaha menyelesaikan tugas dari sekolah.
2) Belajar dengan sungguh-sungguh.
3) Berlatih sesuatu sampai mampu.

Tugas 1.3

Bagaimana sikap kalian jika mempunyai teman dari suku bangsa lain? Bolehkah menghina dan memusuhinya? Berikan pendapatmu di depan kelas!

Ringkasan

1. Pancasila sebagai dasar negara ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.
2. Rumusan Pancasila terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV.
3. Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama para pendiri negara untuk dijadikan dasar negara Indonesia merdeka.
4. Nilai-nilai juang yang dapat dipetik dari sejarah perumusan Pancasila antara lain, musyawarah, kerja keras, tanpa pamrih, menghargai pendapat, mufakat/sepakat, keberanian, rela berkorban, dan mengutamakan persatuan.
5. Generasi muda adalah generasi penerus yang perlu meneladani para tokoh pendiri negara dengan cara mewarisi, melanjutkan dan menerapkan nilai-nilai juang tersebut dalam perilaku sehari-hari.

Latihan Soal

A. Pilihlah satu jawaban yang benar dengan cara memberi tanda silang (X) pada huruf *a*, *b*, *c* atau *d*!

1. Piagam Jakarta dirumuskan dalam sidang BPUPKI oleh . . . .
   a. panitia sembilan
   b. pemerintah Jepang
   c. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta
   d. PPKI

2. Perbedaan rumusan Pancasila yang disahkan sampai saat ini dengan Piagam Jakarta terdapat dalam sila . . . .
   a. pertama
   b. ke dua
   c. ke tiga
   d. ke empat

3. Di bawah ini yang **bukan** tokoh panitia sembilan adalah . . . .
   a. Ir. Soekarno
   b. H. Agus Salim
   c. Drs. Moh. Hatta
   d. Drs. Wahidin Sudirohusodo

4. Ketua BPUPKI adalah . . . .
   a. Prof.Dr Soepomo
   b. Muhammad Yamin
   c. dr. Radjiman Widyodiningrat
   d. Ir. Soekarno

5. Sebagai pelajar kalian dapat menghargai jasa pahlawan dengan cara . . . .
   a. bekerja keras
   b. mengangkat senjata
   c. belajar dengan rajin
   d. menjadi ketua kelas

6. Ketua panitia sembilan adalah. . . .
   a. Ir. Soekarno
   b. Mr. A.A Maramis
   c. H. Agus Salim
   d. Muhammad Yamin

7. Perilaku yang menunjukkan nilai-nilai persatuan dan kebersamaan adalah . . . .
   a. mementingkan kepentingan bersama
   b. berpartisipasi dalam rapat pemilihan ketua kelas
   c. menerima perbedaan pendapat
   d. belajar dengan sungguh-sungguh

8. Sikap yang termasuk nilai-nilai juang dari para pahlawan bangsa adalah . . . .
   a. persaingan
   b. musyawarah
   c. rela berkorban
   d. kedisiplinan

9. Para anggota BPUPKI mengadakan sidang di tengah ancaman penjajahan Jepang. Hal ini menunjukkan adanya sikap . . . .
   a. menghargai pendapat
   b. keberanian
   c. tanpa pamrih
   d. rela berkorban

10. Sikap yang mencerminkan tanpa pamrih adalah . . . .
   a. mengadakan musyawarah
   b. belajar dengan sungguh-sungguh
   c. tidak suka kekerasan
   d. ikhlas memberi sumbangan

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan benar!

1. Kapan pertama kalinya istilah Pancasila dikemukakan?
2. Sebutkan perubahan yang dialami Piagam Jakarta sebelum disahkan menjadi Pembukaan UUD 1945!
3. Nilai-nilai yang dihasilkan para pendahulu negara kita dalam merumuskan Pancasila dinamakan nilai-nilai juang. Mengapa demikian?
4. Berikan tiga contoh nilai juang para pendiri negara Indonesia pada waktu merumuskan Pancasila yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari!
5. Berilah contoh perilaku yang menunjukkan sikap menghargai orang lain!

Bab 2 Sistem Pemerintahan Indonesia

Sumber: *Tempo, 23 Agustus 2003*

Pada bab II ini kalian akan belajar tentang sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan di Indonesia mengenal adanya berbagai lembaga negara. Presiden adalah salah satu lembaga negara. Selain presiden, lembaga negara apa sajakah yang terdapat dalam sistem pemerintahan di Indonesia? Di Indonesia terdapat pemerintahan daerah di samping pemerintahan pusat yang berkedudukan di Jakarta. Apa beda pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah?

Di samping akan dapat menjelaskan tugas dan fungsi pemerintahan daerah, kalian juga dapat menjelaskan pemerintah pusat termasuk lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia serta proses pemilu dan pilkadanya.

A. Pemilihan Umum di Indonesia

Berapa tahun sekali Indonesia mengadakan pemilu?

Tahukah kalian bagaimana presiden dipilih? Ya, presiden sekarang ini tidak lagi dipilih oleh MPR tetapi dipilih rakyat secara langsung. Dengan demikian ada pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung disingkat Pilpres. Pilpres merupakan salah satu pemilihan umum di Indonesia . Menurut ketentuan undang-undang, pemilihan umum di Indonesia sekarang ini ada tiga, yaitu:

1. Pemilihan umum (pemilu) untuk memilih anggota legislatif yaitu DPR, DPD, dan DPRD (disebut pemilu legislatif).
2. Pemilihan langsung presiden dan wakil presiden (pilpres).
3. Pemilihan langsung kepala daerah (pilkada).

1. Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota Legislatif

Pemilihan umum (pemilu) anggota legislatif didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Anggota legislatif adalah para wakil rakyat yang nantinya duduk di badan perwakilan rakyat yaitu DPR, DPD, dan DPRD.

Tahukah Kamu?

Kampanye merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing untuk memperebutkan dukungan masa pemilih dalam suatu pemungutan suara.

Peserta pemilu untuk anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Partai politik mencalonkan orang-orang yang akan menjadi anggota DPR dan DPRD. Calon-calon yang sudah ditetapkan itu dikenal sebagai calon legislatif (caleg). Para caleg dan partai yang mencalonkan selanjutnya mengadakan kampanye. Dalam kampanye itulah rakyat menentukan caleg mana yang akan dipilih dalam pemilu nanti. Calon yang memperoleh jumlah suara yang sudah ditentukan berhak menjadi anggota legislatif.

Peserta pemilu untuk anggota DPD adalah perorangan. Anggota DPD adalah para wakil rakyat dari daerah provinsi yang dipilih oleh rakyat di provinsi yang bersangkutan. Seseorang bisa mencalonkan menjadi calon anggota DPD dari suatu provinsi. Menurut ketentuan undang-undang, setiap provinsi di Indonesia diwakili oleh empat orang anggota DPD. Jadi, para calon yang memperoleh empat jumlah suara terbesar dalam pemilu berhak menjadi anggota DPD dari suatu provinsi.
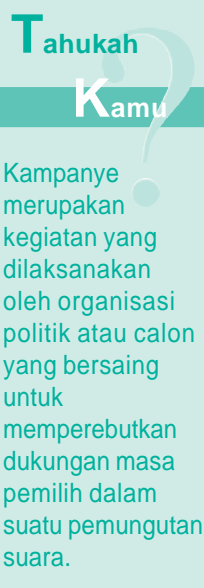
Asas yang digunakan dalam pemilu adalah luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan jurdil (jujur dan adil).

a. Langsung, artinya pemilih memberikan suaranya langsung tanpa perantara.
b. Umum, artinya semua warga negara memenuhi persyaratan berhak ikut pemilu.
c. Bebas, artinya pemilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun.
d. Rahasia, artinya pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun.
e. Jujur, semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
f. Adil, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

Pelaksana pemilu adalah KPU (Komisi Pemilihan Umum).

Apabila diurutkan maka urutan proses pemilu itu sebagai berikut.

a. Pendaftaran pemilih

   Panitia mendaftar para warga yang berhak memilih.

b. Pencalonan

   Peserta pemilu mendaftarkan diri sebagai calon legislatif.

c. Kampanye

   Para calon melakukan kampanye untuk menarik simpati warga.

d. Pemungutan suara

   Warga memberikan suara.

e. Penghitungan suara

   Panitia pemilu mengadakan penghitungan suara.

f. Penetapan hasil pemilu

   KPU menetapkan hasil pemilu.

g. Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih

   KPU menetapkan perolehan kursi dari masing-masing peserta pemilu dan calon terpilih.

h. Pelantikan anggota legislatif

   Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang terpilih dilantik.

Jika dibuat bagan maka urutan proses pemilihan umum itu adalah sebagai berikut.

Bagan 2.1 *Urutan proses pemilihan umum*

2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres)

Menurut ketentuan UUD 1945, presiden dan wakil presiden Indonesia tidak lagi dipilih oleh MPR, tetapi dipilih langsung oleh rakyat dalam satu paket. Dengan demikian, diadakan pemilihan presiden dan wakil presiden. Tata cara pemilihan diatur dengan undang-undang. Pemilihan presiden dan wakil presiden didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Uji Diri

Kapan pertama kali pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dilaksanakan?

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, peserta pemilihan presiden adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Calon presiden dan/atau calon wakil presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.

Setelah resmi dicalonkan maka calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) tersebut melakukan kampanye pemilihan yang didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkannya.

Pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia diumumkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Apabila tidak ada pasangan calon terpilih yang memenuhi syarat di atas maka dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan ke dua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Jadi, akan ada pemilihan presiden tahap II. Pada pemilihan presiden tahap II inilah, pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Tahukah Kamu?

Kampanye pemilu dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang. Masa tenang tersebut berlangsung selama 3 hari sebelum hari/ tanggal pemungutan suara.

Urutan pemilu presiden dan wakil presiden adalah sebagai berikut.

a. Pendaftaran pemilih
b. Pencalonan
c. Kampanye
d. Pemungutan suara
e. Penghitungan suara
f. Penetapan hasil pemilu
g. Pelantikan presiden dan wakil presiden

Presiden dan wakil presiden terpilih memegang jabatan selama lima tahun. Menurut ketentuan UUD 1945 bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima

tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Gambar 2.1 *Pelantikan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden RI setelah memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan presiden tahun 2004*

Sumber: *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar 9*

Jadi, apabila presiden dan wakil presiden terpilih tersebut telah menyelesaikan masa jabatannya selama lima tahun dan mereka masih ingin ikut pemilihan untuk masa jabatan yang ke dua maka hal itu dibolehkan. Akan tetapi, setelah itu pasangan tersebut tidak boleh lagi ikut dalam pemilihan. Pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum).

3. Pemilihan Langsung Kepala Daerah (Pilkada)

Sebelumnya para kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD di masing-masing daerah. Sekarang ini sesuai dengan tuntutan demokrasi, para kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Gubernur dipilih oleh rakyat provinsi, bupati dipilih oleh rakyat dari kabupaten dan walikota dipilih oleh rakyat kota yang bersangkutan.

Gambar 2.2 *Sosialisasi pilkada untuk mendapatkan dukungan masyarakat*

Sumber: *Gatra, Agustus 2005*

Pemilihan langsung kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang

tersebut dinyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon tersebut diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Para pasangan calon kepala daerah selanjutnya mengadakan kampanye yang didukung oleh partai atau gabungan partai yang mencalonkan. Pada hari pemungutan suara yang telah ditentukan, rakyat memberikan suara dengan cara memilih pasangan calon dari beberapa pasang calon yang bersaing. Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Pelaksana pilkada adalah KPU daerah (provinsi, kabupaten, atau kota). Dengan adanya pilkada ini maka semua daerah di Indonesia melakukan kegiatan pilkada. Karena daerah di Indonesia itu banyak, baik provinsi, kabupaten, dan kota maka kegiatan pilkada di Indonesia juga banyak dilakukan. Dengan adanya pilkada ini pula, maka pemilu di Indonesia tidak hanya terjadi setiap lima tahun sekali, tetapi setiap tahun bisa terjadi pemilu yaitu pemilihan langsung kepala daerah (pilkada).

Cobalah bayangkan daerah di Indonesia yang berjumlah sekitar 350 kabupaten kota (dan kemungkinan saat ini sudah mengalami penambahan karena adanya pemekaran). Kalau setiap hari ada pemilihan bupati/wakil bupati maka dibutuhkan hampir satu tahun penuh untuk menyelesaikan seluruh pilkada di Indonesia. Apakah pilkada di daerah kalian sudah dilaksanakan? Masa jabatan kepala daerah adalah lima tahun sama dengan masa jabatan presiden/wakil presiden. Selain itu pasangan kepala daerah tersebut masih boleh ikut serta dalam pilkada sekali lagi.

Tugas 2.1

Lakukan dengan cara wawancara dengan tokoh masyarakat atau pejabat daerah, atau dengan membaca dari koran atau media lain, untuk menjawab pertanyaan berikut:

1. Apakah di daerah kalian sudah dilaksanakan pilkada?
2. Berapa kali pilkada sudah dilaksanakan? Kapan?
3. Siapa saja calon pasangan kepala daerah yang ikut pilkada tersebut ?
4. Siapa nama pasangan kepala daerahmu sekarang ini?

B. Lembaga-lembaga Negara Republik Indonesia

Untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan di Indonesia dibentuk berbagai lembaga negara yang mempunyai tugas dan wewenang masing-masing. Untuk mengetahui lembaga-lembaga negara di Indonesia, bacalah uraian di bawah ini!

1. Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945

Presiden adalah kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Presiden memimpin pemerintahan dan menjalankan pemerintahan di Indonesia.

Macam-macam lembaga negara terdapat dalam ketentuan UUD 1945. Bukalah buku UUD 1945 kalian! Lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 tersebut adalah sebagai berikut.

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
d. Presiden
e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
f. Mahkamah Agung (MA)
g. Mahkamah Konstitusi (MK)
h. Komisi Yudisial (KY)

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota MPR terdiri atas para anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Jadi, seluruh anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR.

Sebutkan beberapa tugas dan wewenang MPR yang lain!

Masa jabatan anggota MPR adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Menurut UUD 1945 tugas dan wewenang MPR sebagai berikut.

1) Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
2) Melantik presiden dan/atau wakil presiden.
3) Memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar atas usul DPR.

Kewajiban anggota MPR sebagai berikut.

1) Mengamalkan Pancasila.
2) Melaksanakan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan.
3) Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kerukunan nasional.
4) Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
5) Melaksanakan perannya sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.
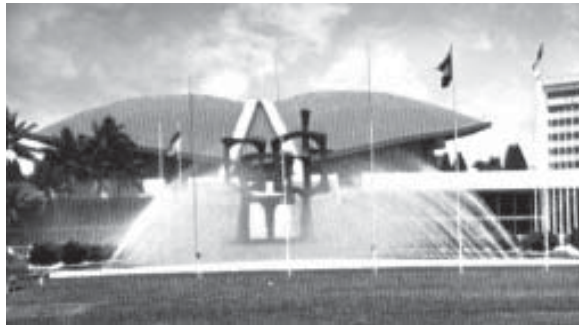
Sumber: *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar 12*

Gambar 2.3 *Gedung MPR/DPR RI*

Tahukah Kamu?

Selain mempunyai kewajiban, anggota MPR juga mempunyai beberapa hak, yaitu:

1. Mengajukan usul perubahan pasal-pasal UUD.
2. Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan.
3. Memilih dan dipilih.
4. Membela diri.
5. Imunitas,
6. Protokoler
7. Keuangan dan administratif.

b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPR beranggotakan para wakil rakyat dari partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum. Pemilihan itu dilaksanakan dalam suatu pemilihan umum oleh semua warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan.

Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun. Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat menjadi anggota MPR.

Menurut UUD 1945 DPR mempunyai fungsi sebagai berikut.

1) Legislasi yaitu membentuk undang-undang.
2) Anggaran yaitu menetapkan anggaran dan pendapatan belanja negara.
3) Pengawasan yaitu mengawasi jalannya pemerintahan.

Anggota DPR berjumlah 560 yang berdomisili di ibu kota negara Republik Indonesia.

Anggota DPR mempunyai kewajiban sebagai berikut.

1) Mengamalkan Pancasila.
2) Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan.
3) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5) Memerhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.
6) Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindak-lanjuti aspirasi masyarakat.
7) Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
8) Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya.
9) Menaati kode etik dan peraturan tata tertib DPR.
10) Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

Apa saja tugas dan wewenang DPD?

c. *Dewan Perwakilan Daerah (DPD)*

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Jadi, setiap provinsi memiliki wakilnya di DPD. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama. Anggota DPD sekaligus menjadi anggota MPR. Masa jabatan DPD adalah 5 tahun.

Menurut UUD 1945 fungsi DPD sebagai berikut.

1) Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan legislasi tertentu. Misalnya, ikut membahas dana perimbangan antar pusat dan daerah.
2) Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu. Misalnya, mengawasi pelaksanaan UU tentang pajak daerah.

d. *Presiden*

Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahan presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Di samping itu presiden membentuk

Presiden memiliki hak prerogatif. Carilah hak-hak tersebut dalam UUD 1945!

kabinet yang terdiri atas para menteri. Menteri-menteri melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang tertentu.

Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum. Masa jabatan presiden adalah 5 tahun. Bila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya maka diganti wakil presiden.

Hal-hal yang perlu kalian ketahui tentang presiden dan wakil presiden Republik Indonesia antara lain:

1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan.
2) Dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden.
3) Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan.
4) Presiden dan wakil presiden dilantik oleh MPR.
5) Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
6) Presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat.
7) Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR, tetapi presiden juga tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sumber: *Fokus Media*

Gambar 2.4 *Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan wakil presiden Jusuf Kalla dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 2004-2009.*

Sumber: *Kompas, 9 Agustus 2006*

Gambar 2.5 *Ketua BPK Anwar Nasution masa jabatan 2004-2009*

e. *Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)*

BPK adalah lembaga negara dengan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada:

1) DPR
2) DPD atau
3) DPRD sesuai dengan kewenangannya

f. *Mahkamah Agung (MA)*

Mahkamah Agung adalah lembaga negara sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tinggi negara. Mahkamah Agung memimpin badan-badan peradilan di bawahnya yaitu:

1) Peradilan umum
2) Peradilan agama
3) Peradilan tata usaha negara
4) Peradilan militer

Apabila ada warga negara yang tersangkut perkara maka ia dapat diadili di lembaga peradilan tersebut.

Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Terdapat ketua Mahkamah Agung. Hakim yang bertugas di Mahkamah Agung disebut hakim agung.

Uji Diri

Siapakah yang menjabat sebagai Mahkamah Agung saat ini?

g. *Mahkamah Konstitusi (MK)*

Sumber: *Tempo, 2 Januari 2005*

Gambar 2.6 *Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Assidiqie masa jabatan 2004-2009*

Mahkamah Konstitusi adalah juga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Jadi pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia ada dua, yaitu:

1) Mahkamah Agung
2) Mahkamah Konstitusi

Wewenang Mahkamah Konstitusi menurut UUD 1945 antara lain:

1) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Siapakah ketua Komisi Yudisial yang sekarang?

2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
3) Memutus pembubaran partai politik.
4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Susunan Mahkamah Kontitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota hakim konstitusi. Hakim yang bertugas di Mahkamah Konstitusi disebut hakim konstitusi.

h. Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang menurut UUD 1945 mempunyai wewenang:

1) Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR.
2) Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Komisi Yudisial mempunyai tujuh orang anggota. Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara. Keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Komisi Yudisial dipimpin oleh seorang ketua Komisi Yudisial.

2. Lembaga Negara Lainnya

Apakah kejaksaan termasuk pula lembaga negara yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

a. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, untuk menyelenggarakan pemilu. KPU bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU menyampaikan laporan dalam tahap penyelenggaraan pemilu kepada presiden dan DPR.

KPU terdiri atas:

1) KPU beranggotakan 7 orang.
2) KPU provinsi beranggotakan lima orang.
3) KPU kabupaten/kota beranggotakan lima orang.

KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota adalah pelaksana pemilu di provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan bagian dari KPU.

Sumber: *http://www.presidenri.go.id*

Gambar 2.7 *Jaksa Agung Hendarman Supandji*

b. *Kejaksaan*

Menurut UUD 1945 kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Susunan kejaksaan terdiri atas kejaksaan agung, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan negeri. Kejaksaan agung berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.

Kejaksaan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. Daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Kejaksaan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota. Kejaksaan Republik Indonesia dipimpin oleh seorang jaksa agung.

c. *Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Sumber: *Kompas, 26 Agustus 2006*

Gambar 2.8 *Kepolisian RI berperan dalam mengamankan dan menertibkan kehidupan masyarakat*

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang:

1) Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2) Penegakan hukum, perlindungan.
3) Pengayoman.
4) Pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian negara Republik Indonesia berada di bawah presiden. Kepolisian negara Republik Indonesia dipimpin oleh kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden. Kapolri ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan DPR. Kedudukan kapolri adalah sebagai pejabat negara yang sederajat dengan menteri.

d. *Tentara Nasional Indonesia*

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk:

Sumber: *http://hinamagazine.com*
Gambar 2.9 *Tentara Nasional Indonesia (Angkatan Darat)*

1) Menegakkan kedaulatan negara.
2) Mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa.
3) Menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.
4) Ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri atas:

1) Angkatan Darat (AD)
2) Angkatan Laut (AL)
3) Angkatan Udara (AU)

Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang PanglimaTNI yang ditetapkan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Kedudukan Panglima TNI adalah sebagai pejabat negara yang sederajat dengan menteri.

Tugas 2.2

Carilah berita di koran/majalah mengenai:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
4. Presiden
5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
6. Mahkamah Agung (MA)
7. Mahkamah Konstitusi (MK)
8. Komisi Yudisial (KY)

Klipinglah berita-berita tersebut! Tugas dilakukan secara kelompok dan hasilnya dikumpulkan pada guru kelas.

C. Pemerintahan di Indonesia

Pembukaan UUD 1945 alinea berapakah yang memuat tentang tujuan negara Indonesia?

Negara Indonesia memiliki cita-cita dan tujuan. Cita-cita negara Indonesia adalah terwujudnya negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Tujuan negara Indonesia adalah sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut.

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara tersebut dibentuklah pemerintah negara. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara Indonesia. Pemerintah negara Indonesia terdiri atas:

1. Pemerintah pusat yang berkedudukan di Jakarta sebagai ibu kota negara.
2. Pemerintah daerah yang berkedudukan di daerah.

1. Pemerintah Pusat

Siapakah pemerintah pusat itu? Pemerintah pusat adalah presiden. Presiden adalah penyelenggara negara tertinggi atau memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di Indonesia. Dalam menyelenggarakan pemerintahan presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Selain itu presiden membentuk kabinet yang terdiri atas para menteri. Para menteri adalah pembantu presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Mereka bekerja di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Dengan demikian meskipun ada wakil presiden dan menteri yang menjalankan pemerintahan, tanggung jawab tetap ada pada presiden selaku kepala pemerintahan.

Tugas pemerintah pusat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia amatlah luas. Tugas itu adalah menjalankan seluruh urusan pemerintahan dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia.

Urusan pemerintahan tersebut antara lain bidang pertahanan, pendidikan, perumahan, kesehatan, ekonomi, hukum, hubungan luar negeri, olahraga, budaya, pertanian,

Sistem manakah yang dipakai negara Indonesia?

sosial, dan sebagainya. Urusan pemerintahan suatu bidang dijalankan oleh menteri selaku pembantu presiden. Misalnya menteri pendidikan menangani urusan pendidikan, departemen pertahanan di bawah menteri pertahanan menangani urusan pertahanan negara.

Namun Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak memusatkan urusan pemerintahan tersebut hanya pada pemerintahan pusat. Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi yang artinya menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintah daerah. Dengan demikian ada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan ada urusan pemerintahan yang diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dijalankan.

Sumber: *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar 5*

Gambar 2.10 *Presiden selaku pemerintah pusat bersama para menteri*

Kedudukan presiden sebagai pemerintah pusat adalah sebagai berikut.

a. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar sebagai penyelenggara negara tertinggi (kepala pemerintahan).
b. Berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
c. Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang.
d. Mengangkat dan memberhentikan para menteri.
e. Membentuk lembaga pemerintahan lain, contohnya dewan pertimbangan, staf ahli, Badan Intelejen Negara, Biro Pusat Statistik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lain-lain.

Sumber: *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar 4*

Gambar 2.11 *Pemberian grasi kepada narapidana merupakan kekuasaan presiden sebagai kepala negara*

Selain sebagai kepala pemerintahan, presiden juga berkedudukan sebagai kepala negara. Kekuasaan presiden sebagai kepala negara antara lain:

a. Pemegang kekuasaan tertinggi atas Tentara Nasional Indonesia (TNI).
b. Memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.
c. Menyatakan perjanjian dengan negara lain.
d. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lain.

2. Pemerintah Daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi, penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya. Perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah lainnya, sesuai dengan kebutuhan daerah.

Kepala daerah sebagai badan eksekutif daerah sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan legislatif daerah.

Untuk lebih memahami tentang pemerintahan daerah, perhatikan bagan di bawah ini.
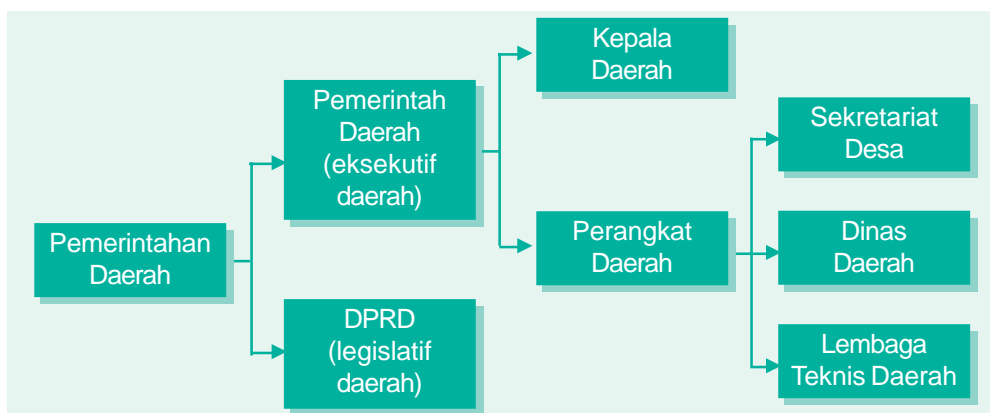
Bagan 2.2 *Pemerintahan daerah*

Setiap daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Kepala daerah di provinsi sebutannya adalah gubernur, kepala daerah di kabupaten sebutannya adalah bupati, sedang kepala daerah di kota sebutannya adalah walikota.

Sumber: *www.flickr.com*

Gambar 2.12 *Kepala daerah dipilih oleh rakyat secara langsung*

Dalam melaksanakan tugasnya kepala daerah dibantu oleh para aparat di daerah seperti sekretaris daerah, kepala dinas, kepala bagian, dan aparat pemerintah daerah lainnya. Kepala daerah menurut undang-undang dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Maka kita mengenal adanya pilkada singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah atau pilkadal singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah Langsung.

Pemerintah daerah menyelenggarakan segala tugas yang menjadi urusan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dengan adanya otonomi daerah, maka sekarang pemerintah daerah menyelenggarakan semua urusan pemerintahan kecuali enam hal yaitu:

a. Politik luar negeri
b. Pertahanan
c. Keamanan
d. Yustisi
e. Moneter dan fiskal nasional
f. Agama

Keenam hal ini tetap menjadi urusan pemerintah pusat.

Dengan demikian, banyak sekali urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan tugas dari pemerintahan daerah. Contoh urusan pemerintahan yang diselenggarakan pemerintahan daerah sebagai berikut.

a. Pendidikan
b. Kesehatan
c. Pelayanan umum
d. Transportasi
e. Pertanian dan kehutanan
f. Peternakan, dan lain-lain

Uji Diri

Tahukah kalian siapa nama bupati di kabupaten tempat tinggal kalian? Siapa nama walikota di kota tempat tinggal kalian? Siapa nama gubernur di provinsi tempat tinggal kalian?

Tugas 2.3

Apa sajakah yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah kalian dalam upaya mengatasi masalah pendidikan di daerah?
Buatlah laporan secara kelompok!
Kalian dapat menanyakan pada para pejabat daerah, kalangan pendidik, tokoh masyarakat, anggota DPRD, atau lainnya yang dapat memberi informasi tentang hal tersebut.
Hasil laporan dibacakan di kelas!

Ringkasan

1. Negara Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan sedang bentuk pemerintahannya adalah republik.
2. Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil. Presiden adalah kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara Republik Indonesia.
3. Negara Indonesia mengenal adanya dua macam pemerintahan yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.
4. Penyelenggara pemerintahan pusat adalah presiden dibantu wakil presiden dan para menteri. Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD.
5. Pemerintahan pusat berkedudukan di Jakarta. Pemerintah pusat adalah presiden dengan dibantu oleh wakil presiden serta para menteri.
6. Pemerintahan daerah terdiri atas DPRD dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah kepala daerah dengan perangkat daerah lainnya.
7. Pemerintahan daerah mengurus semua urusan pemerintahan kecuali enam hal yang menjadi urusan pemerintahan pusat, yaitu:
   a. Politik luar negeri
   b. Pertahanan
   c. Keamanan
   d. Yustisi
   e. Moneter dan fiskal nasional
   f. Agama

Latihan Soal

A. Pilihlah satu jawaban yang benar dengan cara memberi tanda silang (X) pada huruf *a*, *b*, *c* atau *d*!

1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, merupakan bunyi pasal . . . .
   a. 1 ayat 2 UUD 1945
   b. 1 ayat 1 UUD 1945
   c. pasal 2 ayat 1 UUD 1945
   d. pasal 2 ayat 2 UUD 1945
2. Pemerintah pusat berkedudukan di . . . .
   a. ibu kota kabupaten
   b. ibu kota provinsi
   c. ibu kota negara
   d. ibu kota kecamatan
3. Tujuan dibentuknya pemerintahan adalah untuk . . . .
   a. menguasai kekayaan alam
   b. menjadi penguasa negara
   c. mengatur kehidupan bernegara
   d. mengurus pegawai pemerintah
4. Pemerintah kota dipimpin oleh seorang . . . .
   a. DPRD kabupaten
   b. walikota
   c. gubernur
   d. bupati
5. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas . . . .
   a. Angkatan Darat
   b. Angkatan Laut
   c. Angkatan Udara
   d. Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut
6. Salah satu wewenang MPR adalah . . . .
   a. menetapkan peraturan pemerintah
   b. mengangkat dan memberhentikan menteri
   c. mengubah UUD bila diperlukan
   d. memberi grasi
7. Lembaga negara yang berwenang menghentikan presiden dan wakil presiden adalah . . . .
   a. DPR
   b. MPR
   c. BPK
   d. DPD
8. Pemilihan Presiden dan wakil presiden didasarkan pada . . . .
   a. UU Nomor 23 Tahun 2003
   b. UU Nomor 24 Tahun 2003
   c. UU Nomor 25 Tahun 2003
   d. UU Nomor 26 Tahun 2003

9. Pemilihan umum itu penting, sebab melalui pemilu . . . .
   a. masa bakti penguasa dua tahun
   b. pergantian kekuasaan dapat dilakukan secara teratur dan damai
   c. kekuasaan dapat berlangsung seumur hidup
   d. pergantian kekuasaan tidak diperlukan lagi
10. Sebelum tahun 2004, presiden dipilih oleh . . . .
   a. MPR
   b. DPR
   c. rakyat
   d. DPD
11. DPR mempunyai fungsi legislatif artinya . . . .
   a. membentuk undang-undang
   b. menjalankan undang-undang
   c. mengawasi undang-undang
   d. menguji undang-undang
12. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dijalankan oleh . . . .
   a. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial
   b. Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi
   c. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
   d. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial
13. Di bawah ini yang dimaksud pemerintah pusat adalah . . . .
   a. presiden dan DPR
   b. presiden dengan menteri
   c. presiden, DPR, dan MA
   d. presiden dan BPK
14. Anggota DPD merupakan perwakilan dari . . . .
   a. partai politik
   b. golongan di masyarakat
   c. golongan profesi
   d. provinsi
15. Apabila dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia belum didapatkan calon terpilih memperoleh lebih dari 50% suara maka . . . .
   a. pemilu ditunda
   b. pemilu diulang lagi
   c. pemilu dilanjutkan tahap ke dua
   d. dikembalikan pada MPR

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan benar!

1. Bentuk negara Indonesia adalah Kesatuan. Apa maksudnya?
2. Apa beda antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah?
3. Apa tugas dan wewenang MPR?
4. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi. Apa maksudnya?
5. Sebutkan kekuasaan presiden sebagai kepala negara!

Bab 3 Peranan Indonesia di Asia Tenggara

Sumber: *Atlas Indonesia dan Dunia*

Indonesia mengadakan kerja sama dengan negara-negara tetangga. Kerja sama itu dilakukan dalam rangka saling memenuhi kebutuhan, meningkatkan kesejahteraan, dan mewujudkan rasa aman di wilayah tersebut. Dengan demikian, apabila kerja sama itu terjalin baik maka tujuan mulia tersebut dapat menjadi kenyataan. Pada dasarnya itulah keinginan dari masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Bagaimana peran Indonesia dalam rangka mewujudkan kerja sama di wilayah Asia Tenggara?

Pada bab ini siswa diharapkan dapat menjelaskan kerja sama antarnegara-negara di kawasan Asia Tenggara dan juga dapat memberikan contoh tentang peran bangsa Indonesia dalam lingkungan negara-negara di Asia Tenggara.

Negara Indonesia hanyalah bagian dari negara-negara di dunia. Pada peta dunia, negara Indonesia berada di Benua Asia tepatnya di wilayah Asia Tenggara. Negara-negara di wilayah Asia Tenggara merupakan negara-negara tetangga kita. Hal ini karena jarak negara-negara tersebut tidak jauh dengan wilayah Indonesia.

A. Kerja Sama Antarnegara

1. Pengertian Kerja Sama Antarnegara

Kerja sama antarnegara adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara tersebut . Kerja sama antarnegara disebut pula kerja sama internasional. Misalnya kerja sama Indonesia dengan Singapura sudah merupakan bentuk kerja sama antarnegara atau kerja sama internasional.

Sumber: *beritadotcom.blogspot.com*
Gambar. *Kerja sama dapat dilakukan oleh banyak negara*

Kerja sama internasional mencakup berbagai bidang. Artinya hal-hal yang dijadikan isi kerja sama tersebut adalah bidang atau urusan dari negara-negara yang terlibat. Bidang tersebut mencakup kerja sama di bidang politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan kerja sama bidang ekonomi. Misal kerja sama Indonesia dengan Timor Leste mengenai masalah eks pengungsi Timor Timur yang masih berada di perbatasan merupakan kerja sama di bidang pertahanan keamanan

Kerja sama internasional tidak hanya dilakukan oleh satu negara dengan satu negara lain. Kerja sama dapat dilakukan oleh banyak negara mengenai suatu urusan tertentu. Berdasarkan hal ini maka kerja sama antarnegara atau kerja sama internasional ada dua jenis, yaitu;

a. Kerja sama bilateral, yaitu kerja sama yang dilakukan oleh dua negara. Misal kerja sama Indonesia dengan Australia, kerja sama India dengan Cina
b. Kerja sama multilateral, adalah kerja sama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara peserta. Misal kerja sama antara Indonesia, India dan Jepang, negara antarnegara-negara yang tergabung dalam ASEAN

Kerja sama antarnegara dapat dilakukan oleh negara-negara yang berada di suatu wilayah atau kawasan tertentu. Negara-negara tersebut mengadakan kerja sama untuk urusan yang berkaitan dengan kepentingan negara di wilayah tersebut. Misalnya kerja sama antarnegara di Asia Selatan, kerja sama negara-negara yang berada di wilayah Samudra Pasifik. Kerja sama tersebut disebut kerja sama regional. Artinya kerja sama antarnegara yang berada di region atau wilayah tertentu.

Di sisi lain kerja sama antarnegara tidak hanya terbatas dalam satu wilayah. Suatu negara bisa bekerja sama dengan negara lain meskipun letaknya berjauhan, tidak dalam satu wilayah. Misal kerja sama antara Indonesia dengan Belanda mengenai perdagangan batik.

2. Pentingnya Kerja Sama Antarnegara

Mengapa negara perlu melakukan kerja sama internasional? Negara dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tidak mungkin mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Hal ini karena semua kebutuhan yang diperlukan tidak bisa terdapat di suatu negara. Misalkan apakah Indonesia mampu memenuhi kebutuhan susu dan daging untuk seluruh warganya? Meskipun daging dan susu ada, namun jumlah produk itu amat terbatas jadi masih membutuhkan dengan cara mengimpor dari negara lain. Nah, untuk mengimpor kedua produk tersebut, Indonesia perlu mengadakan kerja sama misal kerja sama dengan negara Australia yang dikenal sebagai produsen susu dan daging dunia.

Masih banyak contoh-contoh lain, yang menyebabkan sebuah negara perlu mengadakan hubungan dan kerja sama dengan negara lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup rakyat dan kepentingan nasionalnya. Bisakah kalian memberi contoh?

Dengan demikian banyak manfaat yang dapat diperoleh suatu negara jika mau melakukan kerja sama dengan negara lain ataupun kerja sama dengan banyak negara. Manfaat tersebut antara lain:

a. Bisa memenuhi kebutuhan hidup negara itu.
b. Suatu negara bisa mengekspor produknya ke luar negeri.
c. Suatu negara bisa mengimpor produk luar negeri.

d. Saling memberi kepercayaan antarnegara.
e. Mendapat bantuan bagi negara yang sedang kekurangan atau mendapat bencana.
f. Menciptakan rasa aman dalam melakukan hubungan internasional.
g. Bisa belajar dari pengalaman dan keberhasilan negara lain.
h. Terjadi alih teknologi antarnegara.
i. Ikut mensejahterakan warga dunia.

Apa yang terjadi seandainya suatu negara tidak mau melakukan kerja sama internasional ? Seandainya ada, lama-kelamaan negara tersebut tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidup yang semakin berkembang. Negara tersebut akan menjadi negara yang tertutup atau terisolasi dari perkembangan dunia luar.

Dalam sejarahnya Cina dan Jepang sebelum perang dunia II pernah menjadi negara tertutup. Namun, akhirnya membuka diri terhadap perdagangan dan kemajuan dari negara-negara maju khususnya negara Barat. Sekarang Cina dan Jepang membuktikan diri sebagai negara yang ekonominya berkembang pesat. Hal ini karena kemauan untuk berhubungan dengan negara lain. Negara yang menutup diri dari dunia internasional umumnya akan menjadi negara miskin dan tidak sejahtera kehidupan rakyatnya. Dapatkah kalian sekarang ini memberi contoh suatu negara yang tertutup bagi negara lain?

Negara Indonesia sejak awal bernegara telah terbuka dan melakukan hubungan kerja sama dengan negara lain. Hal ini didorong oleh semangat ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang dihuni banyak negara. Negara-negara di sekitar dan dekat dengan Indonesia tersebut lazim disebut negara tetangga.

Siapa saja negara-negara tetangga Indonesia? Negara-negara tetangga Indonesia adalah sebagai berikut.

a. Singapura
b. Malasyia
c. Brunei Darussalam
d. Philipina atau Filipina
e. Thailand

f. Timor Leste
g. Australia
h. Republik Kepulauan Palau

Tahukah kalian di mana letak negara-negara tersebut? Di samping negara tetangga, ada pula negara-negara yang masih dalam wilayah Asia Tenggara, seperti Laos, Kamboja, Vietnam dan Myanmar. Di luar itu masih ada negara lain seperti Cina, Jepang dan Korea yang berada di Asia Timur. Negara India, Pakistan, Nepal dan Bangladesh di wilayah Asia Selatan. Dengan negara-negara tersebut Indonesia mengadakan hubungan internasional.

Tugas 3.1

Buatlah uraian singkat sebuah negara tetangga Indonesia!

Sumber tulisan dapat kalian cari dari buku-buku, koran atau majalah, berita di televisi, radio, atau dari internet.

Hasilnya dibacakan di depan kelas!

B. Kerja Sama Negara-negara di Asia Tenggara

Negara-negara di kawasan Asia Tenggara saling mengadakan kerja sama. Kerja sama itu diwujudkan dalam bentuk:

1. Kerja sama antardua negara yang disebut kerja sama bilateral.
2. Kerja sama antarlebih dari dua negara yang disebut kerja sama multilateral.
3. Kerja sama dengan cara membentuk organisasi bersama seperti ASEAN.

Negara Indonesia terlibat aktif dalam tiga bentuk kerja sama tersebut. Kerja sama itu meliputi berbagai bidang seperti bidang politik, keamanan, ekonomi dan perdagangan, pariwisata dan kebudayaan, serta teknologi.

1. Kerja Sama Bilateral Indonesia dengan Negara Tetangga

Contoh kerja sama bilateral Indonesia dengan negara tetangga ini antara lain:

a. Kerja Sama Indonesia dengan Singapura

1) Kerja sama pengembangan Pulau Batam dan Kepulauan Riau dalam rangka mendukung industri di Singapura.
2) Kesepahaman antara Politeknik Batam dan *Nanyang Polytechnic*. Pada intinya kedua pihak sepakat untuk mengembangkan kerja sama teknik berupa pertukaran staf pengajar dan siswa.
3) Latihan perang bersama antara angkatan bersenjata Singapura dan TNI di wilayah Indonesia.

b. Kerja Sama Indonesia dengan Brunei Darussalam

1) Mulai membuka hubungan diplomatik RI - Brunei Darussalam yang dibuka resmi pada tanggal 1 Januari 1984 dan kedua pihak menempatkan wakilnya yang berkedudukan di ibu kota masing-masing pada tingkat kedutaan besar.
2) Pembelian pesawat-pesawat IPTN dan kesediaan Brunei mendanai proyek-proyek gedung. Kerja sama selatan-selatan GNB di Jakarta.
3) RRI dan RTB pada tahun 1995 mulai mengadakan kerja sama acara "Siaran Titian Muhibah" dan program "Berbalas Pantun" serta kerja sama pertukaran kunjungan staf penerangan untuk saling bertukar pengalaman di bidang metode dan keterampilan di bidang penerangan.

c. Kerja Sama Indonesia dengan Malaysia

1) Pembentuk komisi bersama RI-Malaysia bagi kerja sama bilateral pada tanggal 20 Juli 1991.
2) Pertukaran juru penerangan, Kelompencapir, dan Titian Muhibah.
3) Penyelesaian masalah TKI yang bekerja di Malaysia.

d. Kerja Sama Indonesia dengan Thailand

1) Terjalin hubungan baik antara kedua negara dengan bukti adanya kunjungan para pemimpin kedua negara.
2) Kerja sama bidang pertanian.
3) Kerja sama bidang pariwisata.

e. Kerja Sama Indonesia dengan Filipina

1) Pembentukan komisi bersama Indonesia-Filipina pada saat kunjungan kenegaraan Presiden Fidel V. Ramos ke Jakarta tahun 1993.
2) Pertemuan komisi bersama Indonesia-Filipina pada tahun 1995, 1998, dan tahun 2002.

f. Kerja Sama Indonesia dengan Kamboja

1) Pembentukan Komisi Bersama Indonesia-Kamboja tahun 1997.
2) Penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*/Nota Kesepakatan) mengenai kerja sama membuka lahan kelapa sawit di Kamboja antara PT. Mestika Sawit Intijaya dengan partner Kamboja *Mong Rethy Group Co*. ltd pada tahun 2003.
3) Indonesia setiap tahunnya memberikan kesempatan kepada para *trainer* dari berbagai instansi pemerintah Kamboja untuk mengikuti program pelatihan di berbagai bidang cukup penting guna meningkatkan sumber daya manusia Kamboja.
4) Selama tahun 2003-2004 Indonesia telah memberikan kesempatan kepada sejumlah 23 *trainer* Kamboja untuk mengikuti program pelatihan di bidang transportasi dan energi.

Tahukah kalian apa yang dimaksud MoU?

g. Kerja Sama Indonesia dengan Myanmar

1) Adanya MoU kerja sama antara pihak RCTI dan Departemen Radio dan televisi Myanmar pada tahun 1999.
2) Perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B).
3) Saling ekspor-impor kedua negara. Komoditi utama ekspor Indonesia antara lain peralatan transportasi, logam dasar dan barang manufaktur, serta minyak goreng. Komoditi utama impor Indonesia antara lain kacang-kacangan, beras, dan hasil-hasil laut.

h. Kerja Sama Indonesia dengan Laos

1) Pada bulan Mei 2004, kedua negara telah menandatangani *Agreed Minutes Komisi Bersama Tingkat Menteri* yang pertama di Jakarta.

2) Saling ekspor impor kedua negara. Komoditi ekspor Indonesia: *Luxury goods*, makanan, pakaian, dan kendaraan. Sedangkan komoditi impor Indonesia: garment.
3) Indonesia dan RDR Laos telah terdapat MoU kerja sama di bidang penerangan yang ditandatangani tahun 1992.

i. Kerja Sama Indonesia dengan Vietnam

1) Pertukaran kunjungan antara pemimpin dan pejabat kedua negara, misalnya kunjungan resmi presiden RI ke Hanoi tanggal 25-27 Juni 2003 dan kunjungan menteri dalam negeri Vietnam ke Jakarta bulan Juni 2004.
2) Perjanjian bebas visa untuk pemegang paspor diplomatik dan dinas untuk kunjungan singkat 2 minggu melalui pertukaran nota dan bebas visa untuk paspor biasa untuk kunjungan selama 30 hari.
3) Penandatanganan beberapa MoU bidang perdagangan antara lain: *MoU on Counter Trade Arrangement* (2003); *MoU on Fisheries Cooperation* (2003), *MoU on Trade Cooperation* antara PT. Niaga Kawan Sukses Indonesia dengan SOHAFARM Vietnam (2003);*Technical Agreement* di bidang program ekspor kopi robusta antara Asosiasi Ekspor Kopi Indonesia/AEKI dengan Asosiasi Kopi dan Cocoa Vietnam/VICOFA (2003).

2. Kerja Sama Multilateral Indonesia dengan Negara Tetangga

Kerja sama multilateral adalah bentuk kerja sama yang tidak hanya melibatkan dua negara, tetapi lebih dari dua negara dalam suatu kawasan. Disebut apa jika kerja sama itu melibatkan dua negara?

Indonesia juga menjalin kerja sama multilateral dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Contoh kerja sama tersebut antara lain:

a. Perjanjian pemeliharaan aktivitas keamanan lintas negara antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina pada tanggal 7 Mei 2002. Melalui kesepakatan tersebut diharapkan ketiga negara dapat saling bekerja sama dan berkoordinasi dalam menghadapi masalah-masalah lintas negara yang akan mengganggu keamanan dalam negeri masing-masing.

b. Kerja sama kebudayaan antara Indonesia, Malaysia, dan Brunei yang masih dalam satu rumpun bahasa. Misalnya dengan program Titian Muhibah.

c. Kerja sama penanganan masalah terorisme dan kejahatan lintas negara antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Misalnya, dengan melibatkan kepolisan ketiga negara tersebut.

d. Pembentukan *Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippine East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA)* pada tahun 1994.

Jadi, kerja sama multilateral Indonesia dengan negara tetangga meliputi bidang politik, keamanan, dan kebudayaan.

3. Pembentukan Organisasi Bersama di Wilayah Asia Tenggara yaitu ASEAN

a. Sejarah Berdirinya ASEAN

Faktor apa yang mendorong terbentuknya ASEAN?

ASEAN, singkatan dari *"Association of South East Asian Nations"* atau Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (Perbara). ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Pada waktu itu pembentukan ASEAN dipelopori oleh lima negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand yang sekaligus menjadi anggota pertama ASEAN. Proses penandatanganan dilakukan dalam satu perjanjian yang dikenal sebagai Deklarasi Bangkok. Deklarasi itu ditandatangani oleh para pemimpin kelima negara yaitu:

1) Adam Malik (Indonesia).
2) Narsisco R. Ramos (Filipina)
3) Tun Abdul Razak (Malaysia)
4) S. Rajaratnam (Singapura)
5) Thanat Khoman (Thailand)

Hafalkan pemimpin kelima negara yang ikut menandatangani Deklarasi Bangkok tersebut?

b. Tujuan dan Anggota ASEAN

Tujuan utama berdirinya ASEAN adalah meningkatkan hubungan dan kerja sama antara negara-negara tersebut dalam rangka keamanan dan kesejahteraan.

Di dalam Deklarasi ASEAN disebutkan bahwa tujuan pendirian organisasi kerja sama kawasan ASEAN ini adalah untuk:

Uji Diri

Hafalkan anggota-anggota ASEAN dan ucapkan secara bergantian dengan teman-teman kalian di muka kelas!

1) Mempercepat pertumbuhan ekonomi.
2) Mengembangkan kerja sama sosial budaya.
3) Memperkokoh perdamaian dan stabilitas kawasan.

Jumlah anggota ASEAN sekarang ada sepuluh negara anggota. Selain Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand, lima anggota baru ASEAN adalah sebagai berikut.

1) Brunei Darussalam (8 Januari 1984)
2) Vietnam (28 Juli 1995)
3) Myanmar (23 Juli 1997)
4) Laos (23 Juli 1997)
5) Kamboja (30 April 1999)

Jadi, hampir semua negara Asia Tenggara menjadi anggota ASEAN kecuali Timor Leste dan Papua Nugini.

c. Kegiatan Kerja Sama dalam ASEAN

Beberapa kegiatan yang diselenggarakan ASEAN dalam rangka peningkatan kerja sama antarnegara anggota antara lain:

1) Mengadakan KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) ASEAN yang dihadiri para pemimpin negara anggota. Pada KTT dibicarakan berbagai hal mengenai kerja sama di berbagai bidang. KTT diselenggarakan setiap tahun sekitar bulan Oktober-November.
2) Pembentukan komunitas ASEAN dan komunitas keamanan ASEAN beserta rencana aksinya.
3) Pembentukan yayasan ASEAN dalam rangka kegiatan pengembangan sumber daya manusia.
4) Pada tanggal 6 Januari 2005, para pemimpin ASEAN menyelenggarakan pertemuan khusus pasca gempa bumi dan tsunami (KTT Tsunami) di Jakarta. Pertemuan ini menghasilkan Deklarasi Jakarta yang bertujuan untuk aksi dan memperkuat bantuan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, dan pencegahan atas dampak bencana gempa bumi dan tsunami.
5) Kerja sama ASEAN bidang kejahatan lintas negara tahun 1997 dengan ditandatanganinya *ASEAN Declaration on Transnational Crime* yang berisi mengenai usaha-usaha ASEAN dan komitmen untuk bekerja sama dengan komunitas internasional dalam memerangi kejahatan lintas negara.

Uji Diri

Carilah informasi dari buku atau sumber-sumber lain apa yang dimaksud kejahatan lintas negara kemudian diskusikan dengan teman kelompokmu!

Tugas 3.2

Klipinglah pemberitaan dari koran, majalah atau tabloid tentang kerja sama Indonesia dengan sebuah negara tetangga dalam suatu bidang tertentu!

Tukarkan hasil kliping dengan teman sekelas untuk dicatat di bukunya masing-masing!

C. Peran Indonesia di Wilayah Asia Tenggara

Negara Indonesia mengharapkan terwujudnya keamanan dan ketertiban dunia. Hal ini sesuai dengan amanat tujuan nasional kita dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan itu bangsa Indonesia berusaha berperan nyata dalam kerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara. Peran Indonesia itu semakin banyak dengan adanya ASEAN di mana Indonesia menjadi salah satu anggotanya.

1. Peran Indonesia dalam Hubungannya dengan Negara-negara Tetangga

Contoh peran Indonesia dalam hubungannya dengan negara-negara tetangga antara lain:

a) Indonesia membantu proses perdamaian di Kamboja dengan penyelenggaraan *Jakarta Informal Metting* (JIM).
b) Indonesia membantu masuknya negara Kamboja, Laos, dan Vietnam untuk menjadi anggota ASEAN.
c) Indonesia ikut mengirim pasukan perdamaian di Vietnam.
d) Indonesia memberi perlindungan bagi warga Vietnam yang mengungsi sebagai "manusia perahu". Warga Vietnam itu ditempatkan di sekitar Kepulauan Batam.
e) Indonesia memberikan dukungan bagi bangsa Timor Leste untuk merdeka meskipun dulunya menjadi bagian dari wilayah Indonesia.

2. Peran Indonesia dalam Hubungannya sebagai Anggota ASEAN

Contoh peran Indonesia dalam hubungannya sebagai anggota ASEAN antara lain:

a) Indonesia merupakan salah satu negara pelopor pembentukan ASEAN.

b) Indonesia merupakan perumus konsep pembentukan *ASEAN Community* (Komunitas ASEAN).

c) Indonesia merupakan pemrakarsa terbentuknya yayasan ASEAN.

d) Indonesia menjadi koordinator *ASEAN Disease Surveillance Net* yang berfungsi sebagai sarana tukar-menukar informasi, termasuk mengenai wabah penyakit SARS.

e) Indonesia berperan sebagai koordinator dalam memfasilitasi kegiatan pertukaran pengalaman oleh negara-negara ASEAN dalam mempersiapkan *Poverty Reduction Strategic Paper* (PRSP) dan memfasilitasi upaya promosi kerja sama antara ASEAN dengan badan-badan keuangan internasional.

Indonesia menjalin hubungan yang baik dan mengadakan kerja sama karena didorong oleh prinsip bahwa bangsa Indonesia merasa dirinya adalah bagian dari bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, diperlukan rasa hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Prinsip demikian terkandung dalam Pancasila sila ke dua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.

Ringkasan

1. Sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia menjalin hubungan dan kerja sama dengan bangsa lain, terutama dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara.
2. Hubungan dan kerja sama Indonesia itu dalam bentuk:
   a. Hubungan dan kerja sama bilateral.
   b. Hubungan dan kerja sama multilateral.
   c. Pembentukan organisasi bersama seperti ASEAN.
3. Organisasi ASEAN didirikan oleh negara-negara di Asia Tenggara dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan memelihara keamanan.

4. Bangsa Indonesia banyak berperan membantu negara-negara tetangga.
5. Bangsa Indonesia banyak berperan sebagai anggota ASEAN.

Latihan Soal

A. Pilihlah satu jawaban yang benar dengan cara memberi tanda silang (X) pada huruf *a*, *b*, *c,* atau *d*!

1. Organisasi ASEAN secara resmi berdiri pada tanggal . . . .
   a. 8 Agustus 1967
   b. 9 Agustus 1967
   c. 10 Agustus 1967
   d. 11 Agustus 1967
2. Pembentukan kawasan SIJORI (Singapura, Johor, dan Riau) adalah bentuk kerja sama yang bersifat . . . .
   a. bilateral
   b. multilateral
   c. internasional
   d. nasional
3. Kerja sama dan hubungan yang dilakukan bangsa Indonesia didorong oleh nilai luhur Pancasila terutama sila . . . .
   a. pertama
   b. ke dua
   c. ke tiga
   d. ke empat
4. Kesepakatan lima tokoh yang memprakarsai berdirinya ASEAN tertuang dalam . . . .
   a. Piagam Jakarta
   b. Deklarasi Bangkok
   c. Sumpah Pemuda
   d. preambul

5. Salah satu tokoh Indonesia sebagai pendiri ASEAN adalah . . . .
   a. Soeharto
   b. Adam Malik
   c. Malik Fajar
   d. Ir. Soekarno
6. Pembentukan *Association of South East Asian Nation* (ASEAN) adalah bentuk kerja sama yang sifatnya . . . .
   a. bilateral
   b. multilateral
   c. internasional
   d. nasional
7. Di bawah ini adalah negara-negara tetangga kita, ***kecuali*** . . . .
   a. Filipina
   b. Brunei Darussalam
   c. Timor Leste
   d. Amerika Serikat
8. Forum perdagangan bebas di wilayah Asia Tenggara dinamakan . . . .
   a. ASEAN
   b. AFTA
   c. NAFTA
   d. SEATO
9. Bukti bahwa bangsa Indonesia tidak ikut kerja sama dalam bidang militer adalah bangsa Indonesia tidak menjadi anggota . . . .
   a. OKI
   b. PBB
   c. AFTA
   d. SEATO
10. Mengadakan *Jakarta Informal Meeting* (JIM) adalah peran Indonesia untuk membantu negara . . . .
    a. Laos
    b. Myanmar
    c. Vietnam
    d. Kamboja
11. Kerja sama yang melibatkan banyak negara disebut . . . .
    a. bilateral
    b. unilateral
    c. transnasional
    d. multilateral

12. "Titian Muhibah" adalah program budaya yang dibentuk oleh tiga negara yaitu . . . .
    a. Indonesia, Malaysia, Filipina
    b. Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam
    c. Indonesia, Malaysia, Singapura
    d. Indonesia, Singapura, Timor Leste
13. Wakil dari Singapura yang menandatangani Deklarasi Bangkok adalah . . . .
    a. S. Rajaratnan
    b. Adam Malik
    c. Thenat Khoman
    d. Tun Abdul Razak
14. Negara yang menjadi pemrakarsa terbentuknya ASEAN adalah . . . .
    a. Indonesia
    b. Singapura
    c. Malaysia
    d. Filipina
15. Kepala negara Malaysia disebut . . . .
    a. yang dipertuan agong
    b. presiden
    c. raja
    d. perdana menteri
16. Di bawah ini yang **bukan** fungsi kepolisian adalah . . . .
    a. pengayoman
    b. penegakan hukum
    c. memelihara ketertiban masyarakat
    d. membuat takut semua warga masyarakat
17. Indonesia, Malaysia, Singapura adalah negara-negara yang berada di kawasan Asia . . . .
    a. Tenggara
    b. Timur
    c. Selatan
    d. Utara
18. ASEAN didirikan dengan tujuan sebagaimana di bawah ini, ***kecuali*** . . . .
    a. mempercepat pertumbuhan ekonomi
    b. memperkuat ketahanan kawasan
    c. memajukan kebudayaan
    d. mempererat persahabatan
19. Negara Brunei Darussalam berbentuk . . . .
    a. republik
    b. kerajaan
    c. presidensiil
    d. parlementer
20. Komboja menjadi anggota ASEAN pada tanggal . . . .
    a. 8 Januari 1884
    b. 28 Juli 1995
    c. 30 April 1999
    d. 23 Juli 1995

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan benar!

1. Mengapa Indonesia memandang perlu melakukan hubungan dan kerja sama dengan negara lain?
2. Apa tujuan dibentuknya ASEAN?
3. Berikan contoh bantuan negara Indonesia yang pernah diberikan pada negara tetangga!
4. Sebutkan peran Indonesia sebagai negara anggota ASEAN!
5. Berikan contoh kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Malaysia!

Bab 4 Politik Luar Negeri Indonesia

Sumber: *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar 4*

Pada bab IV ini, kalian akan belajar mengenai politik luar negeri Indonesia. Kita sebagai bangsa tidak hidup seorang diri saja di dunia. Banyak bangsa dan negara lain yang menjalani kehidupannya. Seperti juga manusia, sebuah bangsa tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Terlebih pada masa sekarang dibutuhkan kerja sama dengan bangsa lain agar saling tercukupi kebutuhan hidup bangsa tersebut. Bangsa Indonesia adalah bagian dari bangsa-bangsa di dunia. Karena itu diperlukan hubungan dan kerja sama dengan bangsa-bangsa lain tersebut.

Bangsa Indonesia perlu memiliki pandangan dan sikap tentang bagaimana kita berhubungan dengan negara lain. Hal demikian itu merupakan politik luar negeri Indonesia. Apakah politik luar negeri itu? Apa politik luar negeri Indonesia? Hal inilah yang nantinya akan kalian pelajari bersama.

Setelah mempelajari materi dalam bab IV ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan politik luar negeri Indonesia saat ini dan memberikan contoh peranan Indonesia dalam percaturan internasional.

Dalam membina hubungan atau kerja sama dengan negara lain, Indonesia menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif sebagai salah satu sarana untuk mencapai kepentingan nasional.

A. Politik Luar Negeri Indonesia

Indonesia sebagai negara ternyata tidaklah hidup sendirian di dunia. Banyak sekali negara-negara di dunia ini. Pada bab sebelumnya kalian sudah mempelajarinya. Bangsa Indonesia adalah bagian dari bangsa di dunia atau umat manusia. Bangsa-bangsa lain juga memiliki pemerintah negara dan menempati wilayah negara.

Uji Diri

Masih hafalkah kalian negara-negara tetangga Indonesia? Sebutkan!

Indonesia sebagai bagian dari bangsa lain perlu berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa itu. Dapatkah bangsa Indonesia hidup sendiri tanpa berhubungan dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia tidak mampu memenuhi sendiri kebutuhan hidupnya. Bangsa Indonesia membutuhkan bantuan dan kerja sama dengan bangsa lain. Negara atau bangsa lain pun demikian. Mereka harus membuka diri untuk menjalin hubungan dan kerja sama termasuk dengan Indonesia.

Hubungan Indonesia dengan bangsa lain dan kerja sama dengan negara lain merupakan urusan politik luar negeri suatu negara. Politik luar negeri artinya segala kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.

Negara Indonesia memiliki politik luar negeri. Lembaga yang menangani bidang politik luar negeri adalah departemen luar negeri. Departemen luar negeri dipimpin oleh seorang menteri luar negeri.

1. Prinsip dan Landasan Politik Luar Negeri Indonesia

Politik luar negeri Indonesia menganut prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional. Apakah yang dimaksud bebas dan aktif tersebut?

Bebas diartikan bangsa Indonesia tidak memihak atau ikut serta pada kekuatan-kekuatan yang ingin berseteru dan tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa. Aktif diartikan Indonesia tidak tinggal diam saja tetapi aktif berperan dalam hubungan internasional dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia.

Politik luar negeri Indonesia diabdikan untuk kepentingan nasional Indonesia. Artinya bahwa bangsa Indonesia melakukan politik luar negeri demi tercapainya tujuan dan cita-cita nasional Indonesia. Politik luar negeri Indonesia adalah salah satu tugas penyelenggaraan bernegara Indonesia. Landasan politik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut.

a. Pembukaan UUD 1945 Alinea IV tentang Tujuan Negara

Sumber: *sdnpandanwangi1.files.wordpress.com*

Gambar 4.1 *Salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa*

Tujuan negara Indonesia menurut pembukaan UUD 1945 alinea IV adalah sebagai berikut.

1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2) Memajukan kesejahteraan umum.
3) Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam rangka melaksanakan tujuan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, negara Indonesia memiliki politik luar negeri.

b. Pembukaan UUD 1945 Alinea IV tentang Dasar Negara Pancasila

Dasar negara kita adalah Pancasila. Sila ke dua dari Pancasila berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Salah satu norma dari sila tersebut adalah bahwa bangsa Indonesia merasa sebagai bagian dari umat manusia atau bangsa lain di dunia, sehingga perlu saling menghormati dan bekerja sama. Untuk memenuhi hal itu maka dilakukan politik luar negeri.

Gambar 4.2 *Antarnegara harus saling kerja sama*

Sumber: *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar 6*

c. *UUD 1945 Pasal 11 Ayat 1, 2, dan 3*

Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3) berbunyi sebagai berikut.

1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

d. *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri*

e. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional*

Kedua undang-undang ini (d dan e) merupakan ketentuan pelaksanaan dari pasal 11 UUD 1945.

2. Sejarah Politik Luar Negeri Indonesia

Pada saat Indonesia merdeka, dunia saat itu sedang dikuasai oleh dua blok kekuataan yaitu Amerika Serikat dengan kelompok atau disebut Blok Barat dan Uni Sovyet (Rusia) beserta kelompoknya yang disebut Blok Timur. Kedua blok tersebut merupakan dua kekuatan yang saling berseteru dan memperebutkan pengaruh pada negara-negara lain.

Sejak kapan politik Indonesia yang bebas dan aktif itu dinyatakan?

Negara Indonesia saat itu tidak lepas dari pengaruh kedua blok kekuatan tersebut. Untuk itu bangsa Indonesia perlu mengambil sikap mengenai politik luar negerinya. Pada tanggal 2 September 1948, Wakil Presiden Mohammad Hatta memberikan keterangan mengenai politik luar negeri Indonesia di hadapan anggota Badan Pekerja KNIP yang diketuai oleh Kasman Singodimejo. Mohammad Hatta waktu itu mengajukan pertanyaan pada anggota komite, sebagai berikut.

"Mestikah bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara harus memilih antara pro Amerika dan pro Rusia? Apakah tidak ada pendirian lain yang harus kita ambil dalam mengejar tujuan dan cita-cita kita?"

Dari pertanyaan tersebut Mohammad Hatta menjawab sendiri dengan keterangan sebagai berikut.

"Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil ialah supaya jangan menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap kita sendiri yaitu Indonesia merdeka seluruhnya".
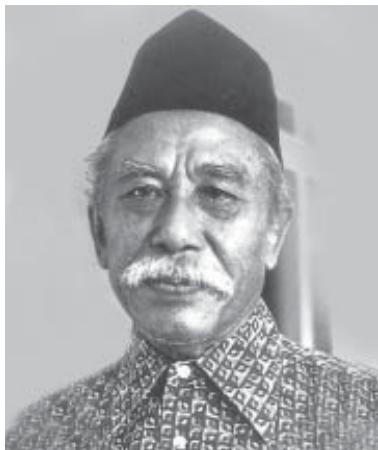
Sumber: *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar 5*

Gambar 4.3 *Kasman Singodimejo, Ketua KNIP yang pertama*

Pidato Mohammad Hatta tanggal 2 September 1948 tersebut diberi judul "Mendayung di antara Dua Karang". Dari judul tersebut dikandung maksud bahwa bangsa Indonesia dalam hal hubungan internasionalnya tetap mendayung (aktif) serta berada di antara dua karang, tidak memasuki salah satunya (bebas). Dua karang yang dimaksud adalah Amerika Serikat dan Rusia (Uni Sovyet).

Berdasar pidato Mohammad Hatta tersebut politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif. Sampai saat ini politik luar negeri Indonesia tetap menganut prinsip bebas dan aktif.

3. Politik Luar Negeri Indonesia Dewasa Ini

Politik luar negeri Indonesia sampai sekarang ini tetap menganut prinsip bebas dan aktif. Meskipun Blok Amerika dan Blok Rusia saat ini tidak ada lagi dan bukan lagi dua kekuatan yang saling berseteru, tetapi Indonesia tetap berprinsip bebas, tidak ikut serta dalam suatu blok kekuatan serta aktif dalam perdamaian dunia.

Sumber: *www.flickr.com*

Gambar 4.4 *Salah satu masalah yang dihadapi bangsa Indonesia adalah illegal logging*

Dewasa ini banyak permasalahan yang menuntut bangsa Indonesia semakin aktif dalam memperjuangkan politik luar negeri yang diabdikan untuk kepentingan nasional.

Contoh masalah yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia dalam kaitannya dengan luar negeri:

a. Munculnya blok-blok kekuatan ekonomi dunia yang tidak hanya Amerika yaitu Eropa Barat, Jepang, Korea, serta Cina.
b. Masalah penentuan garis batas antara Indonesia dengan negara tetangga.
c. Kejahatan-kejahatan internasional atau transnasional seperti terorisme, pencucian uang, *illegal logging*, dan penyelundupan.
d. Adanya masalah yang dihadapi WNI di luar negeri seperti Tenaga Kerja Wanita (TKW), TKI di luar negeri, pelanggaran hukum di luar negeri, dan kelengkapan dokumen warga negara Indonesia di luar negeri.

Berdasarkan masalah-masalah itu, Indonesia tidak dapat menyelesaikan sendiri permasalahan tersebut. Indonesia perlu berhubungan dan kerja sama dengan negara lain. Dalam rangka hubungan dan kerja sama dengan negara lain inilah politik luar negeri Indonesia perlu dimantapkan.

Dapatkah kalian menyebutkan contoh yang lainnya?

Berdasar Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dijelaskan adanya prinsip hubungan luar negeri Indonesia. Prinsip-prinsip hubungan luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut.

a. Berdasar asas persamaan derajat.
   Berdasarkan asas ini maka semua negara, baik besar maupun kecil, kaya ataupun miskin, lama maupun baru adalah sederajat. Semua negara memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam hukum internasional. Mereka pun harus diperlakukan sama.
b. Asas saling menghormati.
   Asas ini menekankan bahwa antarbangsa harus saling menghormati.

Uji Diri

Berikan contoh lain tentang masalah yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia dalam kaitannya dengan politik luar negeri!

c. Asas saling menguntungkan.
Bahwa kerja sama yang kita lakukan diharapkan saling menguntungkan kedua negara. Bangsa Indonesia tidak ingin hubungan yang dilakukan justru akan merugikan negara lain dan merugikan negara sendiri.

d. Asas saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing.
Sebagai penghargaan atas persamaan derajat dan saling menghargai maka bangsa Indonesia berusaha tidak turut campur urusan dalam negeri negara lain. Biarlah negara lain itu yang mengurusinya sendiri. Terkecuali negara itu membutuhkan bantuan dari Indonesia.

Tahukah Kamu?

Pelaksanaan kegiatan hubungan luar negeri, baik regional maupun internasional, melalui forum bilateral atau multilateral, diabdikan pada kepentingan nasional.

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melaksanakan hubungan luar negeri dengan berbagai negara dan organisasi regional maupun internasional. Hal ini sebagai perwujudan dari tujuan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Menurut Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional 2004-2009, sasaran politik luar negeri Indonesia adalah semakin meningkatnya peranan Indonesia dalam hubungan internasional dan dalam menciptakan perdamaian dunia, serta pulihnya citra Indonesia dan kepercayaan masyarakat internasional serta mendorong terciptanya tatanan dan kerja sama ekonomi regional dan internasional yang lebih baik dalam mendukung pembangunan nasional.

Sedangkan arah kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut.

a. Meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional termasuk dalam penyelesaian masalah-masalah perbatasan dan dalam melindungi kepentingan masyarakat Indonesia di luar negeri.
b. Melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi regional, khususnya di ASEAN.
c. Menegaskan pentingnya memelihara kebersamaan melalui kerja sama internasional, bilateral, dan multilateral maupun kerja sama regional lainnya, saling pengertian dan perdamaian dalam politik dan hubungan internasional.

d. Meningkatkan dukungan dan peran masyarakat internasional dan tercapainya tujuan pembangunan nasional.
e. Meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri sesuai dengan undang-undang.

Gambar 4.5 *Pertemuan pejabat dari beberapa negara dalam rangka melakukan kerja sama*

Sumber: *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar 4*

Tugas 4.1

Salah satu kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah upaya memulihkan citra bangsa di mata internasional. Dengan memiliki citra baik maka akan memudahkan bangsa Indonesia menjalin kerja sama dengan bangsa lain.

1. Pernahkah bangsa Indonesia memiliki citra buruk di mata internasional?
2. Perilaku apa sajakah yang dapat menyebabkan citra buruk bangsa Indonesia itu?
3. Menurut kalian, apakah yang harus dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengembalikan citra baik di dunia internasional?

Cobalah diskusikan dengan kelompok kalian!

Hasil diskusi, kalian kemukakan di depan kelas!

B. Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia

1. Politik Luar Negeri Melalui Kerja Sama Internasional

Upaya untuk melaksanakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif adalah dengan melakukan kerja sama dengan negara-negara lain di dunia. Pemerintah Indonesia menjalin kerja sama dengan pemerintah negara lain. Pemerintah juga menjalin kerja sama dengan organisasi-organisasi internasional lainnya.

Macam-macam kerja sama internasional dapat dibedakan menjadi:

Uji Diri

Bergerak di bidang apakah perusahaan Exxon Mobile itu?

a. *Kerja Sama Bilateral*

Kerja sama bilateral adalah kerja sama yang dilakukan oleh dua negara. Kerja sama itu dapat berupa kerja sama antardua negara, atau sebuah negara dengan sebuah organisasi internasional. Kerja sama antardua negara, misalnya kerja sama negara Indonesia dengan Malaysia, kerja sama Indonesia dengan Jepang, kerja sama Singapura dengan India.

Kerja sama antara satu negara dengan sebuah organisasi internasional atau dengan suatu perusahaan internasional. Misalnya; kerja sama Indonesia dengan UNICEF, kerja sama Indonesia dengan WHO, perjanjian kerja sama Indonesia dengan perusahaan Exxon Mobile. Sebutkan contoh yang lainnya?

b. *Kerja Sama Multilateral*

Sumber: *Ensikolpedi Umum untuk Pelajar*

Gambar 4.6 *Lambang ASEAN*

Kerja sama multilateral adalah kerja sama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara. Misalnya, beberapa negara mengikat-kan diri untuk bekerja sama menanggulangi terorisme.

Contoh kerja sama multilateral adalah kerja sama antarnegara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN (*Association of South East Asian Nations*) yang lambangnya dapat kalian lihat pada gambar di samping, kerja sama antarnegara-negara pengekspor

minyak yang tergabung dalam OPEC (*Organization of Petroleum Exporting Countries*).

Adanya kerja sama bilateral dan multilateral dibedakan berdasar jumlah pihak yang melakukan kerja sama. Apabila pihak yang bekerja sama adalah antardua pihak maka disebut kerja sama bilateral. Sedangkan apabila yang melakukan kerja sama internasional adalah banyak pihak maka disebut kerja sama multilateral.

Selain yang disebutkan di atas, kerja sama dapat dibedakan pula menjadi:

1) Kerja sama regional
2) Kerja sama internasional

Apakah kerja sama regional dan internasional itu?

Sumber: *www.iranpetronet.com*

Gambar 4.7 *Pertemuan OPEC*

Kerja sama regional adalah kerja sama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam satu region (wilayah) tertentu. Negara-negara yang berada dalam satu wilayah mengikatkan diri untuk bekerja sama demi suatu kepentingan.

Misalnya negara-negara di wilayah Asia Tenggara bekerja sama dan bergabung ke dalam ASEAN. ASEAN adalah sebuah bentuk kerja sama regional negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Negara-negara yang berada di Eropa tergabung ke dalam MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa).

Kerja sama internasional adalah kerja sama yang dilakukan oleh banyak negara yang tidak terbatas dalam satu region (wilayah) tertentu. Negara yang berada di berbagai wilayah atau belahan dunia boleh bergabung atau menjalin kerja sama.

Contoh, organisasi OPEC (*Organization of Petroleum Exporting Countries*). OPEC tidak hanya beranggotakan negara-negara di wilayah Timur Tengah yang kaya dengan minyak seperti Kuwait, Arab Saudi, Irak, dan Iran. Negara-negara di wilayah lain dapat menjadi anggota OPEC. Indonesia merupakan anggota OPEC meskipun Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara. Aljazair menjadi anggota OPEC meskipun berada di Afrika. Venezuela juga menjadi anggota OPEC meskipun negara tersebut berada di wilayah Amerika Latin. Contoh lain adalah PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).

PBB sekarang ini merupakan organisasi internasional terbesar karena hampir semua negara di dunia menjadi anggota PBB.

Kerja sama regional maupun internasional berbentuk multilateral artinya kerja sama yang dilakukan oleh banyak pihak. Baik kerja sama bilateral, multilateral, dan internasional semuanya merupakan kerja sama yang bersifat internasional oleh karena kerja sama itu dilakukan oleh satu negara dengan negara lain.

2. Kerja Sama Internasional yang Dilakukan Indonesia

Bangsa Indonesia menyadari pentingnya melakukan kerja sama internasional. Telah banyak bentuk kerja sama atau organisasi kerja sama internasional yang diikuti oleh negara Indonesia.

Adapun organisasi internasional yang diikuti Indonesia sebagai berikut.

a. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Sumber: *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar 7*

Gambar 4.8 *Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat*

PBB merupakan singkatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (bahasa Inggris: *United Nations* atau disingkat UN) adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh bangsa di dunia. PBB didirikan di San Francisco, Amerika Serikat pada tanggal 24 Oktober 1945. Tujuan utama PBB adalah perdamaian dunia. Indonesia masuk menjadi anggota pada tanggal 24 September 1950. Indonesia diterima sebagai anggota PBB yang ke-60. Namun, pada masa Orde Lama Indonesia pernah ke luar dari keanggotaan PBB. Pada tanggal 28 September 1966 negara Indonesia masuk kembali sebagai anggota PBB dan tetap diakui sebagai anggota yang ke-60.

b. ASEAN

ASEAN singkatan dari *Association of South East Asian Nations*. ASEAN dapat disebut pula Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara disingkat Perbara. Tujuan utama ASEAN

Sumber: www.foto-foto.com

Gambar 4.9
Adam Malik

adalah menciptakan kestabilan, keamanan, dan kemakmuran bersama bangsa-bangsa di wilayah Asia Tenggara.

Bangsa Indonesia merupakan salah satu perintis berdirinya ASEAN. ASEAN didirikan oleh lima negara di kawasan Asia Tenggara pada tanggal 8 Agustus 1957. Lima negara tersebut adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Para pendiri ASEAN adalah para menteri luar negeri kelima negara yaitu sebagai berikut.

1. Menteri Luar Negeri Adam Malik dari Indonesia.
2. Menteri Luar Negeri Narsisco R. Ramos dari Filipina.
3. Menteri Luar Negeri S. Rajaratnam dari Singapura.
4. Menteri Luar Negeri Thanat Khoman dari Thailand.
5. Menteri Pembangunan Nasional Tun Abdul Razak dari Malaysia.

Sekarang ini ASEAN beranggotakan 10 negara. Negara baru anggota ASEAN tersebut adalah Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Burma (Myanmar).

c. Gerakan Non Blok (GNB)

Gerakan Non Blok (GNB) adalah suatu organisasi internasional yang terdiri lebih dari 100 negara-negara yang tidak menganggap dirinya beraliansi dengan atau terhadap blok kekuatan di dunia.

Uji Diri

Di manakah pelaksanaan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955?

Gerakan Non Blok diawali dengan adanya Konferensi Asia Afrika (KAA) pada tahun 1955 oleh negara-negara Asia Afrika. Sebelumnya diadakan pertemuan atau Konferensi Colombo pada tanggal 28 April 1954 oleh 5 negara yaitu Pakistan, India, Burma, Srilanka, dan Indonesia yang dilanjutkan dengan pertemuan Bogor. Hasil pertemuan Bogor oleh kelima negara adalah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 tersebut.

GNB dibentuk pada tahun 1961 oleh para pemimpin negara yaitu:

1) Joseph Broz Tito, Presiden Yugoslavia.
2) Soekarno, Presiden Indonesia.
3) Gamal Abdul Nasser, Presiden Mesir.
4) Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India.

Sampai sekarang negara-negara yang tergabung dalam Gerakan Non Blok masih tetap saling bertemu. Mereka mengadakan pertemuan dalam forum KTT (Konferensi Tingkat

Tinggi) yang dihadiri para kepala negara atau pemerintahan dari negara-negara anggota. Indonesia merupakan negara yang memprakarsai berdirinya Gerakan Non Blok. Indonesia pernah menjadi ketua Gerakan Non Blok tahun 1992-1995.

d. OPEC

OPEC (*Organization of Petroleum Exporting Countries*), di Indonesia dikenal sebagai Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak. Pendiri OPEC terdiri atas lima negara yaitu:

1) Iran
2) Irak
3) Kuwait
4) Saudi Arabia
5) Venezuela

Saat ini anggota OPEC telah bertambah. Indonesia sebagai negara yang kaya minyak menjadi anggota OPEC. OPEC didirikan dengan maksud untuk mempertahankan harga minyak sehingga minyak sebagai sumber kekayaan dapat memberi keuntungan dan kemakmuran negara-negara anggota. Indonesia menjadi salah satu anggota OPEC.

e. Organisasi Konferensi Islam (OKI)

Organization of Islamic Conference lebih dikenal dengan nama Organisasi Konferensi Islam (OKI). OKI merupakan kerja sama negara-negara berpenduduk mayoritas beragama Islam. Contohnya: Mesir, Pakistan, Saudi Arabia, Irak, Iran, dan sebagainya. Indonesia juga menjadi anggota OKI.

Organisasi ini lebih menitikberatkan kerja sama dalam hal sosial, budaya, dan kemasyarakatan.

f. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)

Organisasi WTO (*World Trade Organization*), di Indonesia lebih dikenal dengan nama Organisasi Perdagangan Dunia. WTO didirikan di Marakesh, Maroko pada tahun 1994. Organisasi tersebut mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni 1995.

WTO diberi kewenangan besar untuk mengawasi penerapan program liberalisasi perdagangan global. Salah satu prinsip WTO adalah meningkatkan perdagangan bebas antarnegara.

Indonesia menjadi anggota WTO dan terikat dengan perjanjian WTO melalui Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pemberlakuan Organisasi Perdagangan Dunia.

Bentuk atau forum kerja sama lain yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia antara lain:

Tahukah Kamu?

Dalam konteks perdagangan internasional, AFTA diharapkan berperan sebagai suatu kekuatan negosiasi dengan pihak asing.

1) AFTA

AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) di Indonesia dikenal dengan nama Kawasan Perdagangan Bebas Asia Tenggara. AFTA merupakan bentuk kerja sama antaranggota ASEAN dalam rangka membentuk perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara. Indonesia ikut serta dalam perdagangan bebas turut pula menandatangani perjanjian AFTA. AFTA diberlakukan mulai tahun 2003.

2) APEC

APEC (*Asia Pasifik Economic Corporation*) adalah salah satu bentuk kerja sama ekonomi negara-negara Asia Pasifik. Negara-negara di kawasan Asia Pasifik bertekad untuk membentuk satu kawasan perdagangan bebas di kawasan tersebut. Indonesia menjadi salah satu anggotanya. Anggota APEC lain adalah Jepang, Amerika Serikat, dan Australia.

Organisasi ini lahir untuk mempersiapkan kemajuan ekonomi kawasan Asia Pasifik dan mengantisipasi era globalisasi kawasan Asia yang akan dimulai tahun 2010.

Gambar 4.10 *Pertemuan para pemimpin negara anggota APEC di Bangkok, Thailand*

Sumber: *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar 1*

3. Peranan Indonesia dalam Dunia Internasional

Negara Indonesia terbukti telah cukup berperan di dunia internasional. Peran serta Indonesia tersebut sebagai wujud nyata dari semangat ikut serta menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keikutsertaan itu juga didorong oleh nilai-nilai luhur Pancasila khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab.

Gambar 4.10 *Penerimaan kontingen garuda yang ikut dalam misi perdamaian di bawah bendera PBB di Kongo*

Sumber: *Gatra, 27 September 2003*

Bukti-bukti dari peran serta Indonesia tersebut antara lain:

a. Indonesia menjadi salah satu negara yang mempelopori terlaksananya Konferensi Asia Afrika 1955 dan terbentuknya Organisasi Non Blok. Pada waktu itu, Indonesia bersama empat negara lain yaitu Burma, Pakistan, Srilanka, dan India mengajak negara-negara Asia Afrika mengadakan konferensi bersama yang dikenal dengan nama Konferensi Asia Afrika di Bandung tanggal 18 - 24 April 1955. Konferensi ini menghasilkan Dasasila Bandung dan menjadi cikal bakal berdirinya Gerakan Non Blok.

b. Indonesia berjasa dalam mensponsori pembentukan Gerakan Non Blok pada tahun 1961. Setelah mengadakan Konferensi Asia Afrika, Indonesia bersama empat negara lain mensponsori berdirinya Gerakan Non Blok. Empat negara tersebut Yugoslavia, Mesir, India, dan Ghana.

Tahukah Kamu?

NATO merupakan organisasi negara-negara Atlantik Utara yang beranggotakan negara-negara seperti Belgia, Inggris, Kanada, Islandia, Italia, Luxemburg, Belanda, Norwegia, Portugal, Turki, dan Amerika Serikat.

c. Indonesia menjadi salah satu negara yang mempelopori berdirinya ASEAN. Indonesia bersama empat negara di Asia Tenggara mempelopori berdirinya ASEAN. Sekarang anggota ASEAN ada 10 negara.

d. Indonesia tidak ikut serta dalam organisasi pertahanan dan militer seperti NATO, SEATO, dan Pakta Warsawa. Hal ini karena tidak sesuai dengan prinsip ketertiban dunia yang damai dan adil.

e. Indonesia mengirim pasukan perdamaian di bawah bendera PBB untuk ikut mewujudkan perdamaian di daerah perang, seperti di Timur Tengah, Vietnam, dan Kamboja.

   Pasukan perdamaian Indonesia ke luar negeri dinamakan Pasukan Garuda. Indonesia sudah mengirimkan Pasukan Garuda sejak tahun 1957 sampai saat ini di bawah bendera PBB.

Pasukan Garuda Indonesia yang Dikirim ke Luar Negeri

No.	Kontingen Garuda	Negara Tujuan	Tahun
1.	Kontingen Garuda I	Mesir	1957
2.	Kontingen Garuda II	Kongo	1960
3.	Kontingen Garuda III	Kongo	1962
4.	Kontingen Garuda IV	Vietnam	1973
5.	Kontingen Garuda V	Vietnam	1973
6.	Kontingen Garuda VI	Timur Tengah	1973
7.	Kontingen Garuda VII	Vietnam	1974
8.	Kontingen Garuda VIII/1	Timur Tengah	1974
9.	Kontingen Garuda VIII/2	Timur Tengah	1975
10.	Kontingen Garuda VIII/3	Timur Tengah	1976
11.	Kontingen Garuda VIII/4	Timur Tengah	1976
12.	Kontingen Garuda VIII/5	Timur Tengah	1977
13.	Kontingen Garuda VIII/6	Timur Tengah	1977
14.	Kontingen Garuda VIII/7	Timur Tengah	1978
15.	Kontingen Garuda VIII/8	Timur Tengah	1978.
16.	Kontingen Garuda VIII/9	Timur Tengah	1979.
17.	Kontingen Garuda IX/1	Iran-Irak	1988.
18.	Kontingen Garuda IX/2	Iran-Irak	1989.
19.	Kontingen Garuda IX/3	Iran-Irak	1990.
20.	Kontingen Garuda X	Namibia	1989.

No.	Kontingen Garuda	Negara Tujuan	Tahun
21.	Kontingen Garuda XI/1	Irak-Kuwait	1992
22.	Kontingen Garuda XI/2	Irak-Kuwait	1992
23.	Kontingen Garuda XI/3	Irak-Kuwait	1993
24.	Kontingen Garuda XI/4	Irak-Kuwait	1994
25.	Kontingen Garuda XI/5	Irak-Kuwait	1995
26.	Kontingen Garuda XII/A	Kamboja	1992
27.	Kontingen Garuda XII/B	Kamboja	1992
28.	Kontingen Garuda XII/C	Kamboja	1993
29.	Kontingen Garuda XII/D	Kamboja	1993
30.	Kontingen Garuda XII	Kamboja	1992
31.	Kontingen Garuda XIII	Somalia	1992
32.	Kontingen Garuda XIV/1	Bosnia-Herzegovina	1993
33.	Kontingen Garuda XIV/2	Bosnia	1994
34.	Kontingen Garuda XIV/3	Bosnia	1994
35.	Kontingen Garuda XIV/4	Bosnia	1994
36.	Kontingen Garuda XIV/5	Bosnia	1994
37.	Kontingen Garuda XIV/A	Bosnia	1994
38.	Kontingen Garuda XIV/B	Bosnia	1994
39.	Kontingen Garuda XIV/C	Bosnia	1995
40.	Kontingen Garuda XV	Georgia	1994
41.	Kontingen Garuda XVI	Mozambik	1994
42.	Kontingen Garuda XVII	Filipina	1994
43.	Kontingen Garuda XVIII	Tajikistan	1997
44.	Kontingen Garuda XIX/1	Sierra Leone	1999-2002
45.	Kontingen Garuda XIX/2	Sierra Leone	1999-2002
46.	Kontingen Garuda XIX/3	Sierra Leone	1999-2002
47.	Kontingen Garuda XIX/4	Sierra Leone	1999-2002
48.	Kontingen Garuda XX/A	Bungo, Kongo	2003
49.	Kontingen Garuda XX/B	Republik Demokratik Kongo	2004
50.	Kontingen Garuda XX/C	Republik Demokratik Kongo	2005
51.	Kontingen Garuda XXIII/A	Lebanon (UNIFIL)	2006
52.	Kontingen Garuda XXIII/B	Lebanon (UNIFIL)	2007

f. Indonesia menjadi anggota dan terlibat aktif dalam berbagai organisasi internasional yang sifatnya nonmiliter, seperti: organisasi perdagangan, pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. Contohnya adalah Indonesia menjadi anggota UNESCO yang bergerak di bidang pendidikan dan anggota WHO yang bergerak di bidang kesehatan.

g. Indonesia menjadi anggota PBB dan salah satu anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia menjadi anggota PBB sejak tahun 1950. Indonesia juga menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tiga kali yaitu:
   a. Keanggotaan pertama periode 1973-1974.
   b. Keanggotaan kedua periode 1995-1996.
   c. Keanggotaan ketiga periode 2007-2008.

Tugas 4.2

Klipinglah berita mengenai keterlibatan pemerintah Indonesia pada salah satu organisasi regional atau internasional.

Selanjutnya jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Organisasi regional atau internasional apa yang diikuti pada berita tersebut?
2. Apa yang dilakukan pemerintah Indonesia berkaitan dengan hal di atas?
3. Menurut kalian, apakah keterlibatan Indonesia itu akan bermanfaat bagi kepentingan nasional kita?
4. Bila bermanfaat, apa manfaatnya?
5. Bila tidak bermanfaat atau merugikan Indonesia, apa kerugian yang akan diterima oleh bangsa Indonesia?

Ringkasan

1. Hubungan luar negeri Indonesia dilakukan melalui politik luar negeri.
2. Politik luar negeri Indonesia adalah sikap, kebijakan, dan langkah pemerintah Indonesia untuk melaksanakan hubungan luar negeri.
3. Hubungan luar negeri Indonesia dilakukan dengan negara lain, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya seperti perusahaan internasional.
4. Politik luar negeri Indonesia mengemban prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional.
5. Hubungan antarnegara dapat berupa kerja sama bilateral, kerja sama multilateral, kerja sama regional, dan kerja sama internasional.
6. Dasar pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah:
   a. Pancasila sila ke dua.

b. Pembukaan UUD 1945 Alinea IV tentang Tujuan Negara.
c. UUD 1945 pasal 11 ayat 1, 2, dan 3.
d. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

7. Kerja sama dan organisasi internasional yang diikuti Indonesia antara lain: PBB, ASEAN, OPEC, OKI, dan Gerakan Non Blok.

Latihan Soal

A. Pilihlah satu jawaban yang benar dengan cara memberi tanda silang (X) pada huruf *a*, *b*, *c,* atau *d*!

1. Politik luar negeri Indonesia yaitu . . . .
   a. bebas
   b. aktif
   c. bebas dan aktif
   d. demokrasi
2. Hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan negara disebut dengan . . . .
   a. keputusan
   b. politik
   c. kebijaksanaan
   d. undang-undang
3. Lembaga yang menangani bidang politik luar negeri adalah . . . .
   a. presiden
   b. DPR
   c. departemen luar negeri
   d. menteri luar negeri
4. Politik luar negeri Indonesia diabdikan untuk . . . .
   a. presiden
   b. kepentingan nasional
   c. menteri luar negeri
   d. pribadi
5. Tujuan negara Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea . . . .
   a. I
   b. II
   c. III
   d. IV
6. Peraturan yang mengatur tentang hubungan luar negeri adalah . . . .
   a. UU No. 36 Tahun 1999
   b. UU No. 37 Tahun 1999
   c. UU No. 38 Tahun 1999
   d. UU No. 39 Tahun 1999
7. Kerja sama yang dilakukan anggota PBB bersifat . . . .
   a. regional
   b. bilateral
   c. multilateral
   d. internasional

8. Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB pada tanggal . . . .
   a. 26 September 1966
   b. 27 September 1966
   c. 28 September 1966
   d. 29 September 1966
9. Di bawah ini merupakan negara pemrakarsa berdirinya GNB, ***kecuali*** . . . .
   a. India
   b. Yugoslavia
   c. Indonesia
   d. Afrika
10. Politik luar negeri Indonesia pertama kali dikemukakan pada tanggal 2 September 1945 oleh . . . .
    a. Ir. Soekarno
    b. Moh. Hatta
    c. Muh. Yamin
    d. Mr. Soepomo
11. Pasukan perdamaian yang dikirim ke luar negeri di bawah payung PBB bernama . . . .
    a. pasukan garuda
    b. pasukan Indonesia
    c. pasukan tentara
    d. pasukan tempur
12. Politik luar negeri merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara Indonesia yang dilaksanakan oleh . . . .
    a. Departemen Pertahanan
    b. Departemen Dalam Negeri
    c. Departemen Luar Negeri
    d. Departemen Internasional
13. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas, maksudnya . . . .
    a. bebas memilih organisasi
    b. tidak pilih kasih
    c. tidak memihak di antara blok kekuatan
    d. tidak melakukan sesuatu kecuali atas kemauan sendiri
14. Prinsip politik luar negeri Indonesia adalah seperti di bawah ini, ***kecuali*** . . . .
    a. persamaan derajat
    b. saling menghormati
    c. saling menguntungkan
    d. saling mencampuri
15. Bentuk kerja sama negara-negara Asia dan Afrika yang diikuti oleh Indonesia adalah . . . .
    a. PBB
    b. ASEAN
    c. KAA
    d. APEC

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan benar!

1. Apa yang dimaksud politik luar negeri bebas dan aktif?
2. Dengan siapa saja bangsa Indonesia mengadakan hubungan luar negeri?
3. Apa saja prinsip-prinsip hubungan luar negeri Indonesia?
4. Apa tujuan utama dibentuknya ASEAN?
5. Sebutkan masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia!

Evaluasi Akhir Tahun

A. Pilihlah satu jawaban yang benar dengan cara memberi tanda silang (X) pada huruf *a, b, c,* atau *d*!

1. Berikut ini adalah kedudukan PPKI bagi bangsa Indonesia, ***kecuali*** . . . .
   a. mewakili bangsa Indonesia
   b. pembentuk negara
   c. badan yang menyiapkan kemerdekaan Indonesia
   d. lembaga yang mewakili pemerintah Jepang

2. Para pendiri negara berhasil merumuskan nilai-nilai Pancasila karena didasari oleh nilai-nilai sebagai berikut, ***kecuali*** . . . .
   a. cinta tanah air
   b. rela berkorban
   c. mementingkan persatuan
   d. dengan pamrih

3. Di bawah ini sikap yang termasuk nilai-nilai juang dari para pendahulu kita, ***kecuali*** . . . .
   a. persaingan
   b. musyawarah
   c. rela berkorban
   d. kedisiplinan

4. Berikut ini contoh perilaku yang mencerminkan rela berkorban . . . .
   a. membantu korban bencana alam
   b. membantu mendirikan rumah
   c. menjadi wakil sekolah
   d. mengikuti upacara bendera

5. Berikut ini contoh perilaku yang mencerminkan semangat cinta tanah air, ***kecuali*** . . . .
   a. menjadi duta wisata
   b. memelihara taman
   c. malas belajar
   d. ikut gotong royong

6. Bentuk negara Indonesia adalah . . . .
   a. kesatuan
   b. republik
   c. serikat
   d. kerajaan

7. Pemerintah pusat yang dimaksud adalah . . . .
   a. MPR
   b. DPR
   c. presiden
   d. kepala negara

8. Pemerintah daerah yang dimaksud adalah . . . .
   a. DPRD
   b. DPRD dengan kepala daerah
   c. kepala daerah
   d. kepala daerah dengan perangkat daerah
9. Berikut ini adalah urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintahan pusat, ***kecuali*** . . . .
   a. keuangan
   b. agama
   c. pertahanan
   d. pendidikan
10. Berikut ini adalah urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah, ***kecuali*** . . . .
    a. pendidikan
    b. kesehatan
    c. keamanan
    d. ekonomi
11. Kepala daerah dipilih langsung oleh . . . .
    a. presiden
    b. DPR
    c. DPRD
    d. rakyat
12. Salah satu tujuan diadakannya kerja sama dengan negara-negara tetangga adalah . . . .
    a. meningkatkan kesejahteraan
    b. mencari keuntungan dari negara lain
    c. mendapatkan bantuan dana dari negara lain
    d. mengetahui rahasia negara lain
13. Negara tetangga Indonesia yang kaya dengan sumber minyak dan terletak di sebelah utara Pulau Kalimantan adalah . . . .
    a. Malaysia
    b. Singapura
    c. Brunei Darussalam
    d. Filipina
14. Utusan negara Singapura yang ikut menandatangani Deklarasi Bangkok adalah . . . .
    a. Tun Abdul Razak
    b. Narsico R.Rawos
    c. Thanat Khoman
    d. S. Rajaratnam
15. Di bawah ini yang **bukan** sekaligus jabatan Sultan Brunei adalah . . . .
    a. kepala negara
    b. kepala pemerintahan
    c. menteri pertahanan
    d. menteri perhubungan
16. Negara yang terletak di barat lautan Pasifik dan kira-kira 100 kilometer dari Benua Asia adalah negara . . . .
    a. Malaysia
    b. Singapura
    c. Filipina
    d. Brunei Darussalam
17. Kepala negara dan kepala pemerintahan Filipina adalah . . . .
    a. presiden
    b. raja
    c. sultan
    d. perdana menteri

18. Thailand adalah negara kerajaan yang menganut sistem pemerintahan . . . .
    a. presidensiil
    b. parlementer
    c. presidensiil dan parlementer
    d. republik
19. Negara di Asia Tenggara yang dikenal dengan sebuah negara tanpa pantai adalah . . . .
    a. Laos
    b. Myanmar
    c. Kamboja
    d. Thailand
20. Negara yang masuk kawasan Asia Tenggara dan dulunya dikenal dengan nama Burma adalah . . . .
    a. Myanmar
    b. Laos
    c. Kamboja
    d. Malaysia
21. Kerja sama yang dilakukan oleh dua negara disebut . . . .
    a. kerja sama bilateral
    b. kerja sama multilateral
    c. kerja sama regional
    d. kerja sama internasional
22. Salah satu contoh kerja sama bilateral adalah . . . .
    a. kerja sama Indonesia dengan UNICEF
    b. kesepahaman politeknik Batam dan Nanyang Polytechnic
    c. OPEC
    d. MEE
23. Organisasi yang mempunyai tujuan utama untuk menciptakan kestabilan, keamanan, dan kemakmuran bersama bangsa-bangsa di wilayah Asia Tenggara adalah . . . .
    a. PBB
    b. ASEAN
    c. OKI
    d. OPEC
24. Bentuk kerja sama antarnegara ASEAN dalam rangka membentuk perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara adalah . . . .
    a. AFTA
    b. NAFTA
    c. APEC
    d. OPEC
25. Salah satu bentuk kerja sama ekonomi negara-negara Asia Pasifik adalah . . . .
    a. APEC
    b. OPEC
    c. AFTA
    d. OKI

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan benar!

1. Sebutkan tiga saja nilai juang dari para tokoh bangsa yang terjadi pada masa perjuangan bangsa!
2. Bagaimana urutan proses pemilihan presiden dan wakil presiden?
3. Berikan tiga contoh perilaku yang mencerminkan nilai menghargai orang lain dalam kehidupan sehari-hari!
4. Siapa yang dimaksud dengan pemerintah daerah?
5. Sebutkan lima negara-negara tetangga Indonesia di wilayah Asia Tenggara!
6. Indonesia terlibat aktif dalam berbagai bentuk kerja sama dengan negara-negara lain. Berikan tiga contoh kerja sama Indonesia dengan Brunei Darussalam!
7. Dapatkah bangsa Indonesia berdiri tanpa bantuan dari negara lain? Jelaskan secara singkat!
8. Berikan contoh kerja sama antara satu negara dengan organisasi internasional atau perusahaan internasional!
9. Jelaskan yang dimaksud kerja sama multilateral!
10. Sebutkan peran serta Indonesia dalam dunia internasional!

Glosarium

***Agreement*.** Persetujuan, kesepakatan.
Area. Wilayah, daerah.
Asas. Dasar, prinsip, fundamen.
Diplomat. Orang yang bekerja di bidang diplomatik.
Diplomatik. Hal yang berkaitan dengan hubungan internasional.
Ekspor. Pengiriman barang ke luar negeri.
Eksekutif. Kekuasaan menjalankan undang-undang.
Impor. Memasukkan barang dari luar negeri.
Internasional. Dunia, mondial.
Internasionalisme. Paham yang mementingkan dunia keseluruhan.
Investasi. Penanaman modal.
Junta. Kepemimpinan kaitannya dengan militer.
Kawasan. Daerah, region.
Komisi. Badan khusus dengan tugas tertentu.
Komoditi. Barang atau jasa yang diperjualbelikan.
Konstitusi. Hukum dasar, Undang-Undang Dasar.
Konsul. Kepala perwakilan konsuler.
Konsuler. Hal yang berkaitan dengan hubungan dagang.
Kudeta. Pengambilalihan kekuasaan dengan kekerasan.
Legislatif. Kekuasaan membentuk undang-undang.
Masa reses. Masa istirahat dari kegiatan bersidang.
Memorandum of Understanding (MoU). Nota kesepahaman antara dua pihak atau dua negara.
Mufakat. Sepakat, suara bulat.
Mukadimah. Pembukaan, *preambule.*
Musyawarah. Pembicaraan bersama, rapat.
Nilai-nilai 45. Nilai-nilai juang yang berasal dari masa perjuangan tahun 1945.
Non Blok. Tidak terlibat dengan blok kekuatan.
Pamrih. Ada kepentingan, ada maksud.
Pengadilan. Lembaga peradilan.
Peradilan. Tugas yang dilakukan pengadilan.
Perdana Menteri. Kepala pemerintahan dalam sistem parlementer.
Presiden. Kepala negara dalam bentuk republik.
Presidensiil. Sistem pemerintahan di mana presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
Prinsip. Dasar, asas.
Region. Wilayah tertentu.
Raja. Sebutan kepala negara kerajaan.
Republik. Bentuk negara yang dipimpin oleh presiden.
Rezim. Penguasa.
Sila. Dasar, asas, prinsip.
Sosialisme. Paham yang mengutamakan kepentingan bersama.
Subjek hukum. Pelaku hubungan dalam hukum.
Sultan. Sebutan kepala negara kesultanan.
Yudikatif. Kekuasaan mengawasi jalannya undang-undang.
Yang Dipertuan Agong. Sebutan kepala negara Malaysia.

Daftar Pustaka

Cholisin. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.

Hassan Suryono. 2005. *Pancasila Progresif*. Surakarta: UPT MKU UNS Bekerja Sama dengan Cakra Solo.

Ignas Kleden. 2004. *Masyarakat dan Negara: Sebuah Persoalan*. Magelang: Indonesiatera.

Jimly Assidiqie. 2004. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945.* Yogyakarta: FH UII Press.

Kaelan. 2003. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

Widjaja, HAW. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Winarno dan Sri Haryati. 2005. *Pendidikan Pancasila*. Surakarta: UPT MKU UNS Bekerja Sama dengan Cakra Solo.

Winarno. 2007. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan.* Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Perjanjian Internasional.

Kunci Jawaban
Pendidikan Kewarganegaraan 6

Bab 1. Nilai Juang dalam Proses Perumusan Pancasila

A. Pilihan Ganda

1. a   3. d   5. c   7. a   9. b

B. Uraian

1. Dalam sidang BPUPKI I
3. Karena terjadi pada masa perjuangan bangsa.
5. Tidak memaksakan pendapat dalam suatu rapat, bersedia menerima pendapat teman.

Bab 2. Sistem Pemerintahan Indonesia

A. Pilihan Ganda

1. b   3. c   5. d   7. b   9. b   11. a   13. b   15. c

B. Uraian

1. Indonesia hanya terdiri atas satu negara dengan satu pemerintahan yang mengatur seluruh penyelenggaraan pemerintahan.
3. a. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
   b. Melantik presiden dan/atau wakil presiden.
   c. Memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar atas usul DPR.
5. a. Pemegang kekuasaan tertinggi atas TNI.
   b. Memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.
   c. Menyatakan perjanjian dengan negara lain.
   d. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lain.

Bab 3. Peranan Indonesia di Asia Tenggara

A. Pilihan Ganda

1. a   3. b   5. b   7. d   9. d
11. d   13. a   15. a   17. a   19. b

B. Uraian

1. Suatu bangsa tidak dapat hidup sendirian tanpa bantuan bangsa lain, untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan kesejahteraan, dan mewujudkan rasa aman di wilayah tersebut.
3. a. Indonesia membantu proses perdamaian di Kamboja dengan penyelenggaraan *Jakarta Informal Metting* (JIM).
   b. Indonesia ikut mengirim pasukan perdamaian.
5. a. Penyelesaian masalah TKI yang bekerja di Malaysia.
   b. Pertukaran Juru Penerangan, Kelompencapir, Titian Muhibah

Bab 4. Politik Luar Negeri Indonesia

A. Pilihan Ganda

1. c 3. c 5. d 7. d 9. d 11. a 13. c 15. c

B. Uraian

1. Bebas diartikan bangsa Indonesia tidak memihak atau ikut serta pada kekuatan-kekuatan yang ingin berseteru dan tidak sesuai dengan nilai luhur. Aktif diartikan Indonesia tidak tinggal diam saja tetapi aktif berperan dalam hubungan internasional dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia.
3. a. Persamaan derajat
   b. Saling menghormati
   c. Saling menguntungkan
   d. Tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing
5. a. Munculnya blok-blok kekuatan ekonomi dunia yang tidak hanya Amerika, tetapi juga Eropa Barat, Jepang, Korea, serta Cina.
   b. Masalah penentuan garis batas antara Indonesia dengan negara tetangga.
   c. Terorisme, pencucian uang, illegal logging.

Evaluasi Akhir Tahun

A. Pilihan Ganda

1. d 5. c 9. d 13. c 17. a 21. a 25. b
3. a 7. c 11. d 15. d 19. a 23. b

B. Uraian

1. Musyawarah, menghargai pendapat, tanpa pamrih.
3. Tidak suka menghina orang lain, mau menerima pendapat orang lain dalam musyawarah, menerima teman yang berbeda suku, golongan, atau agama.
5. Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam.
7. Tidak dapat, karena untuk memenuhi semua kebutuhannya suatu bangsa membutuhkan kerja sama atau bantuan dari bangsa lain.
9. Kerja sama antar lebih dari dua negara.

Pendidikan Kewarganegaraan 6

Untuk Sekolah Dasar & Madrasah Ibtidaiyah Kelas VI

ISBN 978-979-068-082-1 (no. jilid lengkap)
ISBN 978-979-068-096-8

Buku ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2008 tanggal 7 November 2008 tentang Penetapan Buku Teks yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam proses pembelajaran.

Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 5.362,-